

Warta

PERTANIAN

VOLUME V/EDISI MEI 2019



**Stok dan Harga
Bahan Pangan Stabil**

IDUL FITRI HAPPY



PENGARAH:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik

PENYUNTING:

Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

PELAKSANA:

Abiyadun, SE, MM

ANGGOTA:

Dra. Ria Satiti

Imam Santoso, SE

Fajar Rahman M, S.IKOM

Alice Raga Dewi, S.Sos

Hendrayani Yacub, S.Sos

Makmur, SE



Isi diluar tanggungjawab percetakan

Dilarang mengutip tanpa izin
Majalah Warta Pertanian

SALAM REDAKSI



**LEBARAN
CERIA**

STABIL, aman, dan lancar, serta terakhir happy atau gembira atau ceria. Itulah gambaran Idul Fitri 1440 Hijriah atau 2019 Masehi yang dirayakan umat muslim saat menyambut hari kemenangan setelah sebulan full menjalani ibadah puasa.

Jauh-jauh hari, Pemerintah Indonesia sudah menjaga dan mengawal ketat stabilisasi harga pangan. Ini dilakukan selama puasa hingga dan setelah lebaran. Pengawasan tersebut dilakukan bersama Satgas Pangan yang beranggotakan Bareskrim Polri, Polda, Polsek, Perum Bulog, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Karena menjadi ikon paling 'seksi' selama puasa dan lebaran, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bahkan meminta importir mengawal sampai ke konsumen untuk menjaga stabilisasi pangan. Jadi tidak ada alasan lagi bawang putih naik.

Pada 2 Mei 2019, sebanyak 115 ribu ton bawang putih impor telah merapat ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah juga telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor bawang putih sebanyak 100 ribu ton. Langkah ini untuk menjaga stabilisasi harga bawang putih.

Dengan menggelar operasi pasar (OP) dan pasar murah di sejumlah daerah diharapkan konsumen bisa tenang merayakan lebaran karena mendapatkan harga kebutuhan pangan pokok yang terjangkau. Tak hanya bawang putih, OP juga dilakukan untuk komoditas lain seperti bawang merah, cabai, daging, telur, dan sebagainya.

Upaya pemerintah menjaga stabilisasi pangan selama tiga tahun sudah terbukti. Bahkan untuk tahun ini pun harga komoditas pangan relatif stabil. Dalam tiga tahun terakhir, inflasi cukup terkendali.

Terkait impor bawang putih, memasuki bulan suci Ramadhan, Kementan memang telah menerbitkan rekomendasi impor bawang putih terhadap 19 importir swasta. Ini karena para importir itu dianggap telah melaksanakan kewajiban tanam dengan baik. Total volume pengajuan mencapai 245 ribu ton, yang diharapkan bisa terealisasi impornya dalam waktu dekat.

Impor bawang putih masih akan berlangsung hingga 2021 sembari memacu produksi bawang putih lokal melalui program APBN dan wajib tanam importir. Targetnya, ketergantungan terhadap impor bisa diputus pada 2021 nanti.

Sementara itu langkah pemerintah menjaga dan mengawal stabilisasi harga pangan mendapat sambutan positif sejumlah pihak. Komisi IV DPR RI bahkan memberikan apresiasi terhadap usaha dan kerja keras Kementan dalam menyediakan bahan pangan jelang perayaan Idul Fitri. (*)



Warta
PERTANIAN
Menuju Kedaulatan Pangan

05

Selama Ramadhan dan menjelang serta setelah Idul Fitri 1440 Hijriah atau 2019 Masehi, pemerintah melakukan pengawalan terhadap stabilitas harga pangan.

11

Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin persediaan bawang putih memasuki bulan suci Ramadhan hingga akhir Idul Fitri mencukupi.

14

Beberapa hari menjelang Idul Fitri, harga cabai dan bawang merah di beberapa pasar eceran di DKI mulai bergerak naik. Ini disebabkan terganggunya distribusi ke pasar-pasar.

18

Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang telah menjadi anggota Group 20 (G20), naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.

24

Indonesia dan Argentina menyepakati kerja sama bilateral yang lebih erat terkait akses pasar produk-produk pertanian. Kerja sama ini diharapkan dapat lebih memperbesar akses buah tropis eksotis,

28

Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris.

34

Petani ataupun pekerjaan di sektor pertanian pada umumnya masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat.

40

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar acara silaturahmi dan buka bersama keluarga besar Kementerian Pertanian (Kementan) dan pelbagai pihak penting di antaranya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, pers, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Kerukunan Luar Sulawesi Selatan (Sulsel), dan pihak terkait lainnya.

46

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pertanian Indonesia meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. PDB pertanian Indonesia menempati posisi lima di dunia saat ini.



Ini kita bisa lihat dari angka inflasi komoditas pangan. Misalnya jika pada 2014 mencapai 10,5 persen, maka kini hanya satu persen. Ini sebuah lompatan tertinggi dalam sejarah pangan dan ini tidak mudah,”

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI



Stok dan Harga Bahan Pangan Stabil

IDL FITRI HAPPY

Selama Ramadhan dan menjelang serta setelah Idul Fitri 1440 Hijriah atau 2019 Masehi, pemerintah melakukan pengawalan terhadap stabilitas harga pangan. Pengawalan tersebut tujuannya memberikan ketenangan dan rasa aman bagi konsumen.

BERDASARKAN hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Menteri untuk Menjaga Stabilisasi Harga Pangan, pengawalan dilakukan selama puasa hingga dan setelah lebaran atau Idul Fitri 1440 H/2019 M. Pengawalan tersebut dilakukan bersama Satgas Pangan yang beranggotakan Bareskrim Polri, Polda, Polsek, Perum Bulog, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Demikian yang dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta.

"Khusus bawang putih, kami juga sudah minta importir untuk mengawal sampai ke konsumen



untuk menjaga stabilisasi pangan. Jadi tidak ada alasan lagi bawang putih naik," katanya.

Bahkan untuk menjaga stabilisasi harga bawang putih, pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor bawang putih sebanyak 100 ribu ton. Dengan pengawalan tersebut Amran berharap konsumen bisa tenang merayakan Lebaran karena mendapatkan harga kebutuhan pangan pokok yang terjangkau. Salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan operasi pasar (OP) dan pasar murah.

Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih yang sempat bergejolak, pemerintah menggelar OP dengan harga Rp 25 ribu per kg untuk bawang putih dan Rp 22 ribu per kg untuk bawang merah. Data Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, saat ini harga bawang putih sudah Rp 23 ribu per kg.

Upaya pemerintah menjaga stabilisasi pangan selama tiga tahun sudah terbukti. Bahkan untuk tahun ini pun harga komoditas pangan relatif stabil. "Ini kita bisa lihat dari angka inflasi komoditas pangan. Misalnya jika pada 2014 mencapai 10,5 persen, maka kini hanya satu persen. Ini sebuah lompatan tertinggi dalam sejarah pangan dan ini tidak mudah," kata Amran.

Untuk mengecek stok dan harga pangan selama hingga Idul Fitri, Mentan Amran bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Porong Kabupaten Sidoarjo sekaligus menggelar OP bawang putih Rp 18.000 ribu

per kg, yang digelontorkan sebanyak 15 ton. Adapun harga di pasaran mencapai Rp 23.000 per kg pada Rabu (22/5/2019).

Amran menyebutkan dari hasil peninjauan pasar ini, semua stok pangan cukup mencukupi kebutuhan hingga lebaran dan harganya pun stabil bahkan cenderung turun. Harga bawang putih yang sempat menempati Rp 50.000 per kg, tapi kini turun Rp 23.000 per kg di tingkat pengecer dan Rp 18.000 per kg di tingkat grosir. Kemudian harga beras di tingkat pengecer Rp 8.600 per kg, bahkan harga cabai hanya Rp 5.000 per kg karena over supply.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, stok bahan pangan menjelang dan hingga Lebaran sangat aman dan cukup. Baik itu beras, gula, daging ayam, daging sapi, telur minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih dan komoditas lainnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi memastikan seluruh kebutuhan pangan jelang perayaan Idul Fitri 1440 H aman terkendali. Kepastian ini bisa dilihat melalui persediaan stok yang melebihi kebutuhan. "Memang ada beberapa komoditas yang kita impor, utamanya bawang putih. Tapi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Rabu (15/5/2019).

Dijelaskan Agung, kecukupan persediaan ini antara lain



mencakup ketersediaan cabai besar yang mencapai 110,707 untuk April, 113,032 untuk Mei, dan 115,357 untuk kebutuhan pada Juni. “Kemudian kita juga sudah menyediakan kebutuhan cabai rawit dan bawang merah yang mencapai rata-rata 130 ton per bulan. Selanjutnya kami juga menggelar operasi pasar untuk kebutuhan bawang putih dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kecukupan masyarakat,” katanya.

Soal lain yang juga menjadi urusan penting dalam rapat dengar pendapat ini adalah menyangkut ketersediaan beras. Tapi, baik Kementan maupun Bulog menjamin persediaan yang ada serta memastikan stabilitas harga sampai lebaran mendatang. “Kami sudah cek bahwa perkembangan harga di tingkat nasional baik yang premium maupun medium saat ini dalam posisi stabil atau dengan kata lain tidak ada kenaikan. Begitupun dengan yang lain, seperti daging ayam dan sapi. Bahkan untuk daging ayam sudah mengalami penurunan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin memberikan apresiasi terhadap usaha dan kerja keras Kementan dalam menyediakan bahan pangan jelang perayaan Idul Fitri.

“Kita perlu dukung semua usaha Kementan, termasuk yang menyangkut program swasembada bawang putih. Apalagi mereka sedang melakukan penambahan lahan pertanaman bawang putih. Masalahnya hanya satu, yaitu izin impor asal-asalan yang dilakukan kementerian lain,” tandasnya.

Senada dengan Anggota Komisi IV DPR lainnya, Ono Surono meyakini ketersediaan bahan pokok menjelang lebaran mendatang. Tugas ini seharusnya bisa dipikul bersama kementerian dan lembaga lain. “Harga dan kebutuhan memang harus dijaga bersama,” katanya.

Selain Kepala Badan Ketahanan Pangan, rapat ini juga dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura dan Dirjen Perkebunan. Di samping itu, hadir juga diantaranya para Dirjen dari Kementerian Perikanan dan Kelautan serta jajaran petinggi Bulog.

Dalam RDP ini, ada lima poin penting yang disepakati bersama antara lain DPR meminta pemerintah terus memantau harga di tingkat petani maupun tingkat pasar. Kemudian meminta pemerintah mengendalikan impor pangan dan meningkatkan kinerja satuan tugas (Satgas). Terakhir DPR meminta pemerintah menindak tegas pelaku usaha pangan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi.

Ketua Infokom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengatakan, Kementan dibawah kepemimpinan Amran Sulaiman dinilai berhasil menjaga stabilitas pangan. Terlebih saat Ramadan dan lebaran. “Ini saya kira, kondisi yang sangat bagus dari pemerintah karena stok pangan mencukupi, sehingga tidak terjadi gejolak harga. Itu satu hal yang perlu diapresiasi,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Bahkan, lanjut Masduki, sempat dikatakan setidaknya dalam tiga tahun terakhir, inflasi cukup terkendali. Upaya tersebut merupakan bentuk antisipasi pemerintah jauh hari, salah satunya agar masyarakat tidak kesusahan menjelang lebaran. “Ini belum pernah terjadi pada periode-periode sebelumnya. Pemerintah mengendalikan harga, apalagi di saat-saat lebaran *kan*, tidak ada gejolak harga yang meresahkan rakyat,” tambahnya.





Hortikultura Normal

Menjelang Ramadhan, harga-harga sejumlah komoditas bahan pokok terpantau normal, tak terkecuali untuk komoditas hortikultura. Hal itu sebagaimana hasil pemantauan yang dilakukan tim Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/5/2019).

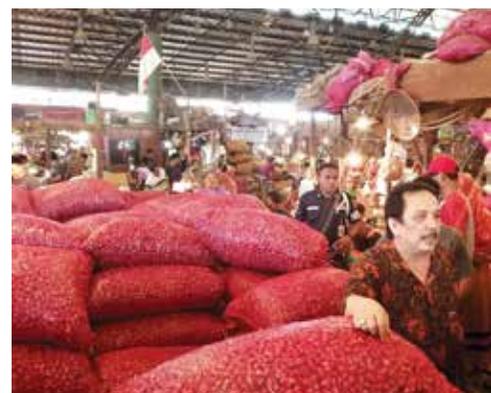
Dari hasil penelusuran kepada sejumlah pedagang, harga cabai, bawang merah, dan bawang putih terpantau stabil alias tak mengalami penurunan maupun kenaikan signifikan. Pasokan yang masuk ke pasar Induk Kramat Jati sebanyak 48 ton untuk cabai merah keriting dengan harga Rp 17.000 per kg, 12 ton untuk cabai merah besar (TW) dengan harga Rp 28.000 per kg, 63 ton untuk cabai rawit merah dengan harga Rp 20.000 per kg, 23 ton untuk cabai rawit hijau dengan harga Rp 13.000 per kg, dan 94 ton bawang merah dengan harga Rp 20.000 per kg.

"Kalau untuk cabai rawit kita dapat dari daerah Rembang dan Muntilan, karena daerah tersebut sedang panen serentak, sehingga dapat dikatakan pasokan untuk menghadapi puasa dan lebaran aman," ujar Jiman, salah satu pedagang besar cabai rawit.

Secara umum, harga aneka cabai stabil dan cenderung rendah dikarenakan panen yang serentak di daerah Jawa Tengah (Jateng). Harga cabai rawit merah berkisar Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per kg, cabai rawit hijau Rp 13.000 hingga Rp 15.000 per kg, cabai merah keriting Rp 15.000 hingga Rp 17.000 per kg, dan cabai merah besar Rp 28.000 per kg.

Pun dengan bawang merah, harga cenderung stabil. Faktanya, salah seorang pedagang besar di sana, Aldo Simbolon mengatakan bahwa untuk kualitas super harganya sekitar Rp 22.000 per kg. Sementara kualitas sedang Rp 15.000 per kg dan bawang giling Rp 5.000 per kg.

Aldo menambahkan bahwa saat ini sedang terjadi panen bawang merah di daerah seperti Brebes, Demak, Purwodadi, dan Nganjuk. Maka dari kebutuhan untuk Ramadhan hingga lebaran aman.





Di tempat terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Suwandi menegaskan, sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga. Ini terutama dua komoditas hortikultura yakni cabai dan bawang merah.

Suwandi menjelaskan hal ini bertepatan dengan panen raya bawang merah dan cabai yang terjadi di sentra-sentra besar bertepatan pada Mei-Juni 2019. Dengan demikian, inilah yang menjadi faktor utama penyebab kepastian pasokan dan harga kedua komoditas tersebut. "Buktinya, saat ini petani di Semarang lagi panen cabai besar 500 hektare (ha) dan cabai rawit 375 ha pada Mei ini. Demikian juga Juni masih panen yang sama, sehingga siap dan cukup untuk memasok Jakarta," kata Suwandi di Desa Samirono Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang guna memantau panen dan pasokan cabai, Rabu (1/5/2019).

Daging dan Telur Aman

Selama Ramadhan dan Idul Fitri, Kementan memastikan stok produk pangan asal hewan utama seperti daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras dalam kondisi aman. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita menegaskan, Kementan terus menjaga ketersediaan pasokan produk pangan asal hewan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN). "Berdasarkan data per minggu pada Mei ini, stok daging sapi sebanyak 65.410 ton, sedangkan kebutuhan ada di angka 59.047 ton, jadi masih ada surplus 6.363 ton yang kita miliki," tegasnya.

Diarmita menambahkan, stok daging ayam yang tersedia sebesar 277.910 ton dan kebutuhan masyarakat di kisaran 274.382 ton atau surplus 3.528 ton. Untuk telur ayam ras tersedia 243.510 ton dan kebutuhannya 167.144 ton atau surplus 76.366 ton. Selain menjaga harga di level konsumen stabil, Kementan juga berkepentingan agar peternak terjamin. Peternak akan terus pula dijaga mendapatkan harga yang bagus, sehingga masing-masing pihak nyaman dan menikmati hasil yang bagus.

Diarmita menegaskan, Kementan terus melakukan operasi pasar (OP) dan memantau perkembangan stok di pasar. Pemantauan pasar juga dilakukan untuk memastikan pangan asal hewan telah memenuhi prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Diarmita menghimbau masyarakat membiasakan membeli produk yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bentuk jaminan Pemerintah. Tim terpadu telah dikerahkan untuk pengawasan produk hewan yang terdiri petugas pengawas kesmavet pusat, dinas peternakan propinsi/kab/kota yang membidangi fungsi peternakan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), Kementerian Agama (BPJPH), dan instansi lain yang terkait pengawasan peredaran produk asal hewan.

Terkait munculnya beberapa pemberitaan telur palsu dan ayam disuntik hormon yang beredar di media sosial, Diarmita menegaskan masyarakat agar tidak terpengaruh berita tersebut.

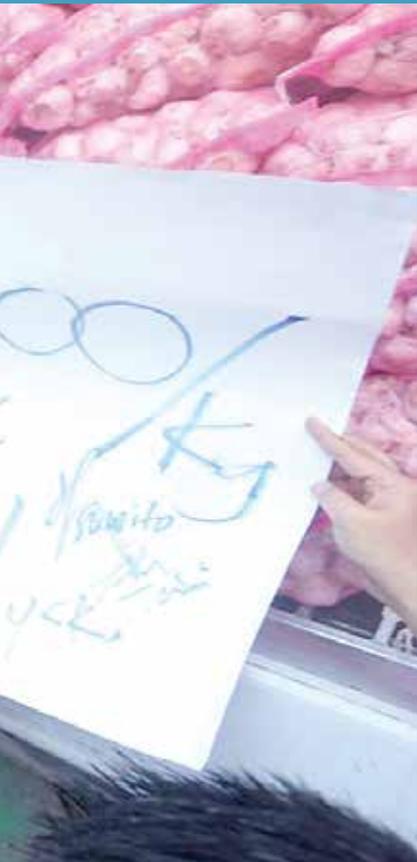
"Berita itu tidak benar, dan Kementan menjamin bahwa tidak ada telur palsu dan ayam yang disuntik hormon yang beredar di Indonesia," tegasnya. **(tim humas)**





GELONTORKAN BAWANG PUTIH UNTUK REDAM HARGA DI PASARAN





KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menjamin persediaan bawang putih memasuki bulan suci Ramadhan hingga akhir Idul Fitri mencukupi. Pasalnya, pada 2 Mei 2019 ini, sebanyak 115 ribu ton bawang putih impor telah merapat ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Tentang harga bawang putih di beberapa pasar yang mengalami lonjakan, Kementan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura melakukan operasi pasar di lima titik di wilayah Jabodetabek antara lain Pasar Perumnas Klender, Pasar Senen, Pasar Rawamangun, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Kebayoran Lama.

"Harga bawang putih sedang tinggi di kisaran Rp 50 hingga 60 ribu. Ini sudah tidak wajar harganya, makanya kami lakukan operasi pasar (OP). OP kami lakukan dua hari, yakni lima ton dan lima ton untuk lima pasar," ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Moh Ismail Wahab di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

"Untuk meredam pasar, kita melakukan OP di lima titik, termasuk pasar retail. Harga yang kami berikan sekitar Rp 23 ribu per kg. Ini dilakukan supaya ada psikologi pasar, sehingga harga stabil jelang kedatangan 115 ribu ton," tegasnya.

Memasuki bulan suci Ramadhan, Kementan memang telah menerbitkan rekomendasi impor bawang putih terhadap 19 importir swasta. Ini karena para importir itu dianggap telah melaksanakan kewajiban tanam dengan baik. Total volume pengajuan mencapai 245 ribu ton, yang diharapkan bisa terealisasi impornya dalam waktu dekat.

"Kementan baru saja merilis kembali terbitnya rekomendasi impor bawang putih. Targetnya untuk mengamankan pasokan dan menstabilkan harga bawang putih nasional terutama saat puasa dan lebaran tahun ini," ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Ditjen Hortikultura Kementan Yasid Taufik di Belitung, Jumat (3/5/2019).

Dia menjelaskan, rekomendasi impor tersebut dikeluarkan bagi pelaku usaha yang secara aktif dan kooperatif melaksanakan kewajiban tanamnya sesuai aturan.

Yasid menambahkan, impor bawang putih masih akan berlangsung hingga 2021 sembari memacu produksi bawang putih lokal melalui program APBN dan wajib tanam importir. Targetnya, ketergantungan terhadap impor bisa diputus pada 2021 nanti. "Kita sedang fokus penyiapan benih bawang putih nasional sambil secara bertahap belajar melakukan penetrasi pasar konsumsi. Tapi sementara sampai 2021, sebagian besar pasokan masih tetap mengandalkan impor," katanya.

Sementara dalam OP pangan di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Minggu, (5/5/2019), Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebutkan, OP pangan murah ini salah satunya menggelontorkan empat kontainer bawang putih dengan kapasitas mencapai 30 ton per kontainer dengan harga Rp 25 ribu per kg dan ditargetkan harga maksimal sampai ke konsumen Rp 30 ribu per kg. Harga ini sudah ditandatangani atau disepakati para importir.

"Kita bertemu di pasar menstabilkan harga pangan strategis yang biasanya selama ini naik. Dalam rapat terbatas kemarin, arahan Presiden Jokowi kami diminta turun langsung mengecek ke lapangan harga komoditas pangan strategis khususnya bawang putih," ujarnya.

Amran menegaskan stok bawang putih selama Ramadhan hingga Idul Fitri tahun ini dua kali lipat daripada kebutuhan. Stok tersebut sebanyak 115 ribu ton, sedangkan kebutuhan hanya 50 ribu ton. Karena itu, pemerintah meminta pada para importir di seluruh Indonesia untuk bertanggung jawab agar harga bawang putih turun dari Rp 46 ribu per kg

Rp 25 ribu per kg, apabila tidak komitmen dipastikan untuk diberikan sanksi berat yakni dblacklist, sehingga tidak lagi bisa mengimpor bawang putih. Kementan bersama Satgas Pangan Mabes Polri melakukan monitoring harga secara harian untuk menjaga harga pangan selama bulan suci Ramadhan. Amran menambahkan, Kementan hingga saat ini sudah mem-blacklist sebanyak 56 importir bawang putih nakal yang terdiri dari sebanyak 41 importir hingga Mei 2019 dan tahun lalu sekitar 15 importir yang tidak mentaati aturan wajib tanam dan berproduksi 5 persen dan selalu mempermainkan harga. Mayoritas importir yang dblacklist domisili di Jakarta, Surabaya, dan Medan. "Dengan demikian, harga bawang putih dan komoditas lainnya ke depan stabil. Petani dan pedagang sama-sama untung serta konsumen menikmati harga pangan yang murah," tandasnya.

Selain bawang putih, dalam operasi pangan murah di Pasar Induk Kramat Jati ini, Kementan juga menyediakan komoditas pangan lainnya di antaranya beras, minyak goreng, dan gula. Untuk harga cabai, daging ayam dan telur ayam, Amran menyebutkan komoditas pangan ini justru mengalami deflasi antara Februari-Maret. "Tahun ini kita jaga stabil. Kita harapkan harga menguntungkan di tingkat petani, peternak dan di tingkat konsumen harga tetap stabil. Caranya, disparitas harganya kita perkecil karena rantai pasoknya terlalu panjang," jelasnya.

Buktinya, pasokan cabai besar pada Mei 2019 sebesar 113 ribu ton, sedangkan kebutuhan hanya 76 ribu ton sehingga masih surplus 37 ribu ton. Untuk cabai rawit pasokan 99 ribu ton, kebutuhan 64 ribu ton, surplus 35 ribu ton. "Sedangkan pasokan bawang merah 132 ribu ton, sementara kebutuhan 112 ribu ton sehingga surplus 20 ribu ton," sebut Amran.

Usai OP murah di Pasar Kramat Jati, Mentan melanjutkan tinjau harga pangan. Amran mengatakan, dari hasil pengecekan ini, terpantau harga pangan khususnya beras stabil. Dia menjamin harga beras ke depan terus stabil karena stok beras nasional saat ini sebesar 2 juta ton lebih. "Kemudian saat ini pun sedang panen raya. *Nah* yang kita jaga, kami sudah diskusi dengan Bulog yaitu harga di tingkat petani, jangan sampai petani rugi," ujarnya.

Sementara itu, Kementan kembali menggelar OP bawang putih selama lima hari di 40 pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 200 ton bawang putih dijual dengan harga Rp 25 ribu per kilogram, sehingga mengundang animo masyarakat membeli. Gelaran operasi pasar yang gencar dilakukan Kementan bersama mitra tersebut untuk menekan harga bawang putih khususnya di DKI Jakarta berangsur normal.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Moh Ismail Wahab saat dihubungi, Kamis (9/5/2019), menyebut OP serentak yang dilakukan pihaknya untuk mempercepat proses stabilisasi pasokan dan harga bawang putih di pasar. "Kementan ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dan lebaran nanti dengan tenang dan *happy*. Kita gelontor pasokan bawang putih langsung ke pasar eceran supaya lebih tepat sasaran dan harga juga lebih cepat kembali normal. Tentu tidak serta merta harga turun drastis. Dampak operasi pasar mulai terlihat dan dirasakan," ujar Ismail. "Nyatanya harga bawang putih hari ini rata-rata seluruh Jakarta mulai bergerak turun sebesar Rp 2.617 per kg. Sementara di pasar induk Kramat Jati rata-rata sekitar Rp.30.000 per kg," terangnya.

Ismail menyebut selain OP di 40 pasar DKI Jakarta, pihaknya juga menggelar OP di Lampung, Padang, Medan, dan beberapa kota besar lainnya. Pada Kamis (9/5/2019), OP kembali dihelat di Lampung, jumlah bawang putih yang digelontorkan sebanyak 1 kontainer, yakni 29 ton. OP ini dilakukan di tiga titik antara lain Pasar Panjang, Pasar Tugu dan di Toko Tani Indonesia (TTI) Lampung.

Sementara OP bawang putih yang dihelat Kementan bekerja sama dengan importir dan Dinas Pertanian Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Mamuju dan Maneje diserbu pembeli. OP yang bertempat di di Anjungan Pantai Manakara, Mamuju, dan Pasar Sentral Majene dimulai sejak pukul 07.30 WIT, Kamis (16/5/2019).

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Moh. Ismail Wahab menyebutkan tingginya harga bawang putih di kedua tempat ini menjadi alasan Kementan melaksanakan OP untuk menekan harga yang mencapai Rp 60 ribu per kg. "Arahan Mentan agar dijual Rp 25 ribu, maksimal Rp 30 ribu. Dengan OP ini, kita mau mempercepat proses distribusi, terutama ke wilayah yang masih tinggi (harga). Kalau di Jakarta dan Pulau Jawa-Sumatera *sih* harga sudah banyak turun. OP kita sukses," ujarnya.

Harga bawang putih yang berangsur normal dan turun di beberapa daerah, mendapatkan reapon positif masyarakat. Setidaknya Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim Arbi memuji langkah cepat pemerintah, khususnya Kementan menstabilkan suplai bawang putih di pasaran. Langkah OP yang masif berhasil menurunkan harga bawang putih. "Kami berterima kasih Mentan mau segera turun tangan menambah suplai bawang putih. Ini sangat membantu masyarakat di tengah Ramadhan," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

(tim humas)





OP CABAI *dan* BAWANG MERAH *dari Petani*

BEBERAPA hari menjelang Idul Fitri, harga cabai dan bawang merah di beberapa pasar eceran di DKI mulai bergerak naik. Ini disebabkan terganggunya distribusi ke pasar-pasar. Kementan melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) lantas melakukan Operasi Pasar (OP) cabai dan bawang merah ke pasar-pasar eceran, terutama yang harga cabai dan bawangnya tinggi atau berkisar Rp 40.000 – Rp 50.000/kg.

Tingginya harga cabai dan bawang merah di pasar eceran, kemungkinan sebagian pedagang mulai mengurangi pasokannya karena pasar akan tutup selama lebaran, dan sebagian pedagang termasuk pedagang keliling mulai mudik.

Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi saat melepas OP di Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Pasar Minggu Jakarta, Jumat (31/5/2019) pagi mengatakan, ada 10 pasar eceran di DKI yang menjadi sasaran OP dan berlangsung dari 31 Mei–2 Juni. “Cabai dan bawang merah untuk kebutuhan OP didatangkan langsung dari petani di Tuban, Sumedang, Kabupaten Bandung dan

Cirebon,” tambahnya.

Dalam OP ini, harga cabai rawit merah dijual Rp 10.000 per kg, cabai merah keriting Tuban Rp 18.000 per kg, cabai merah keriting Sumedang Rp 20.000 per kg, bawang merah brebes Rp 22.000 per kg, dan bawang merah batu Rp 20.000 per kg.

Sementara dalam upaya memudahkan masyarakat memperoleh pangan pokok yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, Kementan menghadirkan Toko Tani Indonesia (TTI) Center di Kota Bogor, Jawa Barat. TTI Center ini tepat berada di tengah Kampus Penelitian Pertanian Jalan Tentara Pelajar (Cimanggu) No 1, Bogor. Keberadaan TTI Center ini diharapkan dapat menetralkan gejolak harga pangan yang terjadi di Kota Bogor seiring Ramadhan dan Idul Fitri, serta Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) lainnya. BKP telah membangun TTIC di setiap ibu kota Provinsi.

Agung menyampaikan bahwa TTIC ada di 21 provinsi. “Semuanya sudah kami penuhi untuk kebutuhan pangan murah, terutama di 600 TTI Jakarta,”



tandasnya.

Keberadaan TTIC mendapat sambutan baik dari masyarakat luas. Meski begitu, animo masyarakat paling besar ada di radar e-commerce. Bahkan transaksi yang tercatat jumlahnya mencapai Rp 11,5 miliar. “Transaksi sebesar itu hanya pada 2019 lho, makanya ini sangat luar biasa sekali karena yang datang langsung ke TTIC hanya 10 persen saja. Selebihnya mereka berbelanja dengan menggunakan e-commerce,” tukas Agung.

Sedangkan menjelang lebaran, TTIC di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dipadati ribuan warga yang membeli beragam kebutuhan pangan. Mereka mengaku senang karena bahan pokok yang dijual relatif murah. “Saya beli daging cuma Rp 70 ribu. *Kan* harganya selisih jauh sama di pasar tradisional yang mencapai Rp 130 ribu,” ujar Kodijah (33), salah satu pembeli daging asal Lenteng Agung saat ngobrol bareng di halaman TTIC, Jumat (31/5/2019).

Sementara para petani cabai rawit merah di Tuban, Jatim justru memasuki panen raya pada Ramadan dan menjelang lebaran. Ini menyebabkan hasil panen cabai melimpah ruah yang berimbas pada turunnya harga jual di tingkat petani. Tim Ditjen Hortikultura bersama BKP lantas bergerak cepat terjun ke lokasi untuk menemui para petani. Tim Kementan juga mengajak para pelaku usaha swasta untuk menyerap langsung panen cabai.

Dirjen Hortikultura Suwandi mengatakan, pihaknya bergerak cepat karena tak ingin petani cabai kecewa. Bahkan langsung mengajak beberapa mitra swasta dan Toko Tani Indonesia untuk langsung menyerap panen rawit merah di Tuban dengan harga yang layak.

“Tim kami langsung terjun ke Tuban. Kita klarifikasi dan cari solusi konkret bersama-sama. Jadi petani



tidak mengalami kerugian,” ujarnya di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Selain itu, Kementan juga dorong pemda setempat aktif menggerakkan pegawainya untuk membeli atau mengadakan pasar murah. Upaya ini dipastikan sangat cepat membantu harga cabai petani naik ke posisi normal. “Cabai petani kita bantu jual dengan harga sepentasnya,” kata Suwandi. **(tim humas)**





AWASI KETAT TIGA PRODUK TERNAK





DAGING sapi, daging ayam, dan telur ayam ras adalah tiga komoditas hasil ternak yang selalu meningkat permintaannya selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Karena itu, pemerintah memantau dan mengawasi ketat kondisi pasokan tiga jenis bahan pangan sumber protein hewani tersebut agar tak terjadi lonjakan harga di masyarakat.

Untuk pemenuhan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri 2019, Kementan mencatat ketersediaan daging sapi atau kerbau mencukupi dengan surplus sebanyak 2.450 ton. Adapun prediksi kebutuhan nasional pada Mei-Juni 2019 sebanyak 123.105 ton yang akan dipenuhi oleh produksi sapi lokal 72.576 ton, stok persediaan 40.620 ton, dan rencana pemasukan daging sapi impor dan jeroan pada bulan Juni sekitar 12.359 ton.

Sementara itu dengan menghitung potensi produksi dan kebutuhan pada Mei-Juni 2019, daging ayam diprediksi surplus sebanyak 30.373 ton, dan komoditas telur akan surplus sebanyak 153.761 ton. Angka tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan angka kebutuhan telur sebanyak 326.329 ton dan stok persediaannya 480.090 ton.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan I Ketut Diarmita Ketut mengatakan, pihaknya patut bersyukur puasa dan lebaran tahun ini, ketersediaan daging sapi serta telur dan daging ayam ras sangat terkendali. "Dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan, pemerintah mewaspadai tiga aspek utama, yaitu kecukupan stok, distribusi, dan kenaikan permintaan. Kementan melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dan bersinergi bersama instansi terkait," ujarnya dalam acara Bincang Asik Pertanian Indonesia di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNak) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Fini Murfiani mengatakan, data ketersediaan daging sapi secara nasional didapat dengan melakukan pemantauan populasi sapi potong di lokasi peternak dan di perusahaan penggemukan (feedlotter) serta stok daging beku impor di gudang importir dan gudang Bulog.

Sementara Kementan mendistribusikan 8 ton telur ayam ras ke tujuh pasar tradisional di Jakarta di antaranya Pasar Palmerah, Gondangdia, Glodok, Pluit, Petojo Ilir, Tebet Barat dan Pulo Gadung. Distribusi ini merupakan rangkaian operasi pasar (OP) pangan. "Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau. Kita harus pikirkan peternak, pedagang dan konsumen sama-sama untung," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Pasar Tebet Barat, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Dia mengatakan, OP ini adalah hasil kesepakatan semua pihak untuk menjaga kebutuhan masyarakat selama menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, peternak wajib mematok harga jual wajar supaya harga pasar tetap sesuai. "Sekali lagi, yang terpenting adalah menjaga peternak kecil supaya mereka tetap untung. Kemudian konsumen juga harus dijaga. Kesimpulannya adalah peternak kecil untung dan pengusaha juga untung," katanya. **(tim humas)**



Group 20 Agriculture Minister Meeting 2019 di Jepang

SUKSES PERTANIAN RI WARNAI DEKLARASI MENTAN G20

Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang telah menjadi anggota Group 20 (G20), naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Karena itu, kehadiran Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang juga sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (DELRI) sangat dinantikan banyak pihak dalam G20 Agriculture Minister Meeting (G20 AMM) 2019 di Prefektur Niigata, Jepang, Sabtu (11/5/2019).

AJANG pertemuan bergengsi negara-negara maju ini menghasilkan G20 Agricultural Ministers' Declaration atau Deklarasi Menteri Pertanian (Mentan) Negara-Negara G20. Kehadiran Mentan Amran dipandang penting untuk menggaungkan kepentingan dan keberhasilan pembangunan sektor pertanian Indonesia yang beberapa di antaranya mewarnai dokumen G20 Agricultural Ministers' Declaration.

Adapun isu utama yang menjadi bahasan penting dalam AMM 2019 antara lain 'Innovation toward future sustainability of the agro-food sector, Food Value Chains toward inclusive growth



Generasi milenial demikian tertarik dengan internet dan teknologi informasi. Maka, kita dapat gunakan digitalisasi untuk menarik mereka kembali ke sektor pertanian,"

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Future Ministers' Meeting

May 11-12, 2019



Future Ministers' Meeting 2019

of the agro-food sector, dan Knowledge exchange to address global issues'.

Dalam Plenary Session (Sesi Paripurna) G20 AMM tersebut, Amran menyampaikan beberapa intervensi Indonesia yang mengusung kepentingan Indonesia. Ini antara lain pentingnya kesetaraan akses bagi petani kecil dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi. Peralnya, teknologi merupakan variabel penting untuk mendorong kemajuan petani adalah penguatan digitalisasi. "Ini akan membuka peluang baru pengembangan dan akses terhadap rantai nilai pangan pertanian yang merupakan modal dasar pembangunan sumberdaya manusia (SDM)," jelasnya.

Karena itu, Amran menegaskan, pentingnya dukungan teknologi digital dalam menghubungkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga siap memasuki era Industri 4.0 dipenetrasi menggunakan teknologi berbasis internet. Alhasil, produsen dan konsumen pangan akan terhubung dan memperoleh

keuntungan dengan hubungan komunikasi langsung berbasis internet tersebut. "SDM pertanian merupakan modal pembangunan yang penting. Kewirausahaan petani muda di pedesaan harus didorong karena minat generasi muda terhadap sektor pertanian saat ini menurun," tegasnya.

Indonesia berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan generasi muda pertanian perlu ditingkatkan. Peningkatan pengetahuan dan teknologi dikhususkan pada petani skala kecil dan generasi muda. "Generasi milenial demikian tertarik dengan internet dan teknologi informasi. Maka, kita dapat gunakan digitalisasi untuk menarik mereka kembali ke sektor pertanian," jelas Amran.

Selanjutnya, dalam Breakout Session, Mentan pun menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) bersamaan dengan tantangan kelaparan dan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara di dunia.





Karena itu, Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional yang berisi program-program lima tahun ke depan terkait aktivitas pendukung pencapaian tujuan SDGs pada 2030 yang dituangkan dalam roadmap. "Kami membuat program khusus yang modern, holistik, dan inovatif dengan beberapa terobosan revolusioner. Dari sinilah pendapatan nasional kami naik 34,3 persen," sebutnya.

Amran membeberkan capaian lain pembangunan pertanian yang membanggakan, yakni investasi asing dalam bentuk Foreign Direct Investment meningkat dramatis hingga 110 persen dan ekspor pertanian pun naik 29,7 persen, sehingga inflasi pangan turun 8 persen. "Di level rumah tangga, angka kematian bayi turun 1,9 persen dan balita dengan gisi buruk pun turun 3 persen," bebernya.

"Dampak makro yang luar biasa kami alami adalah tingkat kemiskinan menjadi satu digit, yaitu 9,66 persen," imbuh Amran. Penurunan kasus gizi buruk merupakan dampak positif dari program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sebab, program ini mendukung penyediaan bahan pangan pertanian secara mandiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah tinggal.

State Secretary of Agro Industry Argentina Luis Miguel Etchevehere menyatakan kekagumannya kepada Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan pemerintahan Indonesia secara langsung kepada Mentan Amran di tengah berlangsungnya 'exhibition tour' yang dihadiri seluruh ketua delegasi. Bahkan, beberapa negara anggota G20 dan organisasi internasional pun berkeinginan untuk berdialog langsung dengan Mentan Amran selama G20 AMM berlangsung.

Menteri Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang Takamori Yoshikawa, Menteri Pertanian Peternakan dan Pasokan Pangan Brazil Dr Tereza Cristina Correa, Menteri Lingkungan dan Sumberdaya Air Singapura Masagos Zulkifli, Menteri Pertanian dan Pembangunan Perdesaan China Changfu Han, Ketua Delegasi India Ramesh Chand, dan President ERIA Hidetoshi Nishimura menemui dan berkenalan secara khusus dengan Amran untuk mengagendakan pertemuan bilateral formal lebih lanjut di Jakarta.

Perlu diketahui, dalam Sesi Paripurna G20 AMM, Amran hadir bersama 16 Mentan Anggota G20, empat Mentan negara tamu undangan dari Spanyol, Singapura, Thailand, Chili, dan Belanda, serta delapan pimpinan organisasi internasional di bidang pertanian seperti Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Food Policy Research Institute (IFPRI), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Food Program (WFP), dan World Trade Organization (WTO).

Ajang AMM merupakan kelanjutan dari pertemuan Agriculture Deputies Meeting G20 pada Maret 2019 di Tokyo, Jepang. Sementara dalam AMM G20 di Niigata, delegasi Indonesia yang diketuai Amran diikuti pula antara lain Plt Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Prof Erizal Jamal, Tenaga Ahli Mentan Baran Wirawan MSc, Peneliti Utama PSEKP Dr Mat Syukur, Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara Drh Wisnu Wasisa Putra MP serta Biro Kerja Sama Luar Negeri dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.



Ajak Forum G20

Mentan Andi Amran Sulaiman juga mengajak negara-negara anggota G20 untuk memperhatikan pentingnya kesetaraan akses bagi petani kecil dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi, terutama Information and Communication Technology (ICT). Langkah ini perlu dilakukan sebagai dukungan pada pembangunan sektor pertanian. “Kemudian kita juga perlu perbaikan pada FVCs (Global Food Value Chains) dalam rangka peningkatan efisiensi dan mendorong kesejahteraan petani,” katanya dalam paparannya di Pertemuan Tingkat Mentan Negara G20 di Niigata, Jepang, Minggu (12/4/2019).

Menurut dia, Forum G20 sudah seharusnya memberikan perhatian yang lebih besar kepada petani kecil dan generasi muda agar mereka mau terjun langsung ke sektor pertanian. Bagian ini, adalah program strategis Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kewirausahaan pemuda tani. “Anak muda dan digitalisasi perlu diperhatikan supaya sektor pertanian terus memiliki inovasi dalam rantai nilai pangan (FVC),” ujarnya.

Amran menekankan, seluruh delegasi juga perlu berkolaborasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan pencapaian SDGs dengan memperhatikan kesepakatan global pada Rencana aksi United Nations Decade of Family Farming 2018-2028.

Dalam hal ini, lanjut dia, Indonesia memberikan masukan untuk tetap memperhatikan kesetaraan isu ‘fair trade’ negara-negara G20, terutama yang menyangkut pencapaian rantai nilai pangan (Food Value Chains/FVC). Beberapa usulan di antaranya berhasil masuk rumusan utama dalam deklarasi akhir yang dibacakan pada saat penutupan pertemuan.

Di sisi lain Amran menyayangkan ketidakjelasan kesepakatan Forum G20 dalam menyikapi Food Loss dan Food waste. Pandangan ini rupanya mendapat

respon baik dan dipaparkan lebih luas oleh banyak kalangan, termasuk dari Bank Dunia. “Saya berharap ke depan dari setiap kesepakatan yang ada, dibuat roadmap implementasi sebagai pedoman bagi negara anggota dalam menyusun rencana yang lebih spesifik sesuai kondisi dan kepentingan negara anggota,” katanya.

Pemaparan Amran juga langsung mendapat apresiasi dari Mentan India, Singapura, Jepang, dan Direktur Jenderal FAO. Apresiasi tersebut utamanya soal keberhasilan Indonesia dalam membangun pertanian hingga mencapai swasembada beberapa komoditi. Usai pertemuan, Mentan Amran langsung mendatangi pameran AMM G20 dan mengunjungi Hirabara-Shi, Niigata Ken untuk melihat budidaya padi. Di sana, Amran berdialog dengan petani muda asal Cirebon yang magang melalui program Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Akhmad Maulana serta bapak asuhnya Masato Suto.

Apresiasi Dirjen FAO

Direktur Jenderal (Dirjen) Food and Agriculture (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia Jose Graziano da Silva mengapresiasi berbagai keberhasilan Indonesia dalam pembangunan sektor pertanian. Ini disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman saat menghadiri G20 AMM, 10-12 Mei 2019 di Niigata, Jepang beberapa hari lalu, Sabtu (12/5/2019).

“Dirjen FAO berharap, kita dapat membagi cerita sukses pembangunan sektor pertanian di tanah air ke negara lain, sebagai pembelajaran,” ujar Amran usai bertemu Jose.

Dalam pertemuan empat mata tersebut, Amran melaporkan pencapaian produksi pangan Indonesia yang meningkat, juga berbagai upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga bahan pangan. “Sebagai program lanjutan setelah berbagai pencapaian, FAO minta Pemerintah Indonesia untuk memberi perhatian juga pada isu ‘food loss dan food waste’. Dan FAO siap berkolaborasi untuk itu,” jelas Amran.







Timba Ilmu Negeri Sakura

Dalam sesi Kunjungan Lapang di sela G20 AMM 2019 di Niigata, Jepang, Sabtu (12/5/2019), Mentan Amran bertandang ke lahan persawahan di 1475, Hirabara-Shi, Niigata-Ken untuk mendapatkan 'fact finding' budidaya padi di Negeri Matahari Terbit.

Petani padi di Jepang memang dikenal memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Untuk menimba 'best practices' yang diterapkan petani Negeri Sakura, Pemerintah Indonesia setiap tahun mengirim para petani muda untuk program magang.

Mentan menyaksikan derasnya aliran air irigasi pada saluran tersier yang terlihat asri. Amran juga berdialog dengan petani padi Masato Shuto didampingi petani muda asal Desa Kalibuntu, Pabedilan, Cirebon, perwakilan dari P4S Ikamaja Garut yang magang pada Shuto, Ahmad Sri Maulana.

Dari dialog dengan petani terungkap, bahwa petani Jepang mendapatkan fasilitas yang sangat memadai dalam melakukan usahatani. Fasilitas pemerintah yang paling menonjol adalah tersedianya sarana input produksi yang memadai dan diserapnya hasil produksi oleh Japan Agriculture, Koperasi Pertanian Jepang (JA). "Kami sudah full mekanisasi, Daijin (Menteri). Mulai tanam sampai panen. Kami kesulitan tenaga kerja. Maka dari itu, kami menggunakan petani muda asal Indonesia. Maulana tinggal bersama kami.

Sudah saya anggap keluarga. Dia bersemangat kerja dan kemampuan bahasa Jepangnya lebih bagus daripada Senpainya," jelas Shuto.

Japan Agriculture memberi bantuan pembiayaan tanpa bunga untuk pembelian pupuk dan pestisida setara Rp13 juta per ha atau Rp8 juta untuk pupuk dan Rp 5 juta untuk pestisida. Untuk benih padi Japonica, petani menyediakan secara mandiri. "Satu hektare berapa biayanya dan juga berapa kilo hasilnya? Dijual ke mana dan berapa harganya?" tanya Amran penasaran.

"Produktivitas padi di sini rata-rata 4,3 ton gabah kering giling (GKG)/ ha dengan harga setara Rp30 ribu/kg yang semuanya ditampung oleh Japan Agriculture. Kami hanya simpan sedikit untuk kebutuhan konsumsi," jawab Shuto.

Dengan begitu rata-rata petani padi Jepang mendapatkan penghasilan setara Rp 130 juta per musim tanam. Pertanaman padi di Jepang hanya satu kali selebihnya digunakan untuk usahatani hortikultura. Bercermin pada petani Jepang, petani Indonesia semestinya bisa sesajahtera petani Jepang mengingat produktivitas petani padi RI jauh lebih tinggi dibandingkan petani Jepang, 5,2 ton GKG per ha dibanding 4,3 ton GKG per ha. Faktor utama penentu tingginya pendapatan petani padi Jepang adalah harga gabahnya Rp 30 ribu GKG per kg dibandingkan Rp 4.600 ribu GKG per kg. Semoga 'finding facts' petani Jepang ini akan memperbaiki kesejahteraan petani Indonesia hari-hari mendatang. **(tim humas)**





Jatuh Hati dengan Buah RI,

ARGENTINA

SIAP IMPOR

INDONESIA dan Argentina menyepakati kerja sama bilateral yang lebih erat terkait akses pasar produk-produk pertanian. Kerja sama ini diharapkan dapat lebih memperbesar akses buah tropis eksotis, rempah, dan produk unggulan Indonesia lainnya ke pasar ekspor Argentina. Inilah hasil pertemuan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Wakil Presiden Argentina Gabriela Michetti di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta pada Rabu (8/5/2019).

"Kita sudah pelajari, Indonesia punya potensi besar untuk mengekspor buah tropis eksotis dan rempah ke Argentina seperti nanas, manggis, salak, kopi, dan lada. Potensi lainnya produk olahan hortikultura untuk bahan baku untuk industri makanan jadi," kata Amran dalam keterangan persnya usai pertemuan.





Mentan menerangkan, produksi nanas Indonesia pada 2018 mencapai 2 juta ton, dan sudah diekspor ke negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa hingga 250 ribu ton per tahun. Sementara itu, ekspor manggis mencapai 40 ribu ton dari produksi 160 ribu ton selama 2018. Begitu juga dengan salak yang diekspor ke negara-negara Asia sebanyak 1,2 ribu ton dari 950 ribu ton produksi petani pada 2018.

Untuk produk olahan hortikultura, Amran menjelaskan bahwa yang berpotensi besar untuk diekspor antara lain pasta cabai, pasta bawang, pasta buah-buahan seperti jambu, manga, dan sirsak. Selain itu, Argentina juga diharapkan bersedia membuka akses pasar untuk sarang burung walet yang menjadi andalan ekspor Indonesia. "Indonesia punya potensi besar memasok produk-produk hortikultura. Argentina adalah salah satu pasar non-tradisional yang kita coba akses agar pertanian kita bisa menghasilkan devisa lebih besar, ini sejarah untuk kita membuka akses pasar pertanian ke Argentina," jelas Amran.

"Kita melalui Badan Karantina Pertanian sudah mengajukan permohonan secara resmi untuk akses pasar untuk pisang, nanas, manggis, dan salak ke Argentina sejak November 2017," tambahnya. "Melalui pertemuan ini, segera ditindaklanjuti," tandasnya.

Selain akses pasar, Amran juga menjabarkan bahwa Indonesia menjajaki potensi kerja sama transfer teknologi pertanian dari Argentina, di antaranya sistem penyimpanan hasil pertanian yang efisien dan ramah lingkungan (silo bag), serta teknologi penanaman tanpa olah tanah (no till farming) yang bisa memperpendek proses dan memangkas ongkos produksi. "Argentina bahkan siap berinvestasi di Indonesia untuk teknologi

alat mesin pertanian, seperti dryer atau alat pengering," ujar Amran.

Dalam kesempatan itu, Mentan menegaskan bahwa Indonesia menutup impor jagung asal Argentina karena sudah swasembada, bahkan telah melakukan ekspor. Indonesia pun bersedia berbagi pengalaman soal keberhasilan mencapai swasembada dalam waktu singkat melalui peningkatan produktivitas, manajemen pengairan, indeks pertanaman, dan mekanisasi kepada Argentina.

Wakil Presiden Argentina Gabriela Michetti mengapresiasi berbagai capaian pembangunan pertanian Indonesia selama pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan, Pemerintah Argentina membuka peluang pasar ekspor, khususnya komoditas hortikultura Indonesia ke Argentina. Pasanya, kebutuhan Argentina terhadap buah tropika seperti nanas, salak, manggis, pisang, dan komoditas lainnya sebanyak 95 persennya impor. "Buah-buah ini kami impor dari Meksiko dan Brazil. Ke depan, kami buka peluang pasar Indonesia," ujarnya.

Dalam pertemuan ini, Amran didampingi Sekjen Kementan Syukur Iwantoro, Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil, dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita. Sementara pihak Argentina juga diwakili Secretary of Agriculture Livestock and Fishery Guillermo Bernaudo, President of National Food Security and Quality Service Ricardo Negri, Deputy Head of Mission Leandro Waisman.

Menyikapi penolakan impor jagung asal Argentina, Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia menyebutkan bila sang menteri telah bertindak memuliakan petani. "Amran sudah menjaga kerja dan perekonomian petani



jagung supaya tetap sejahtera. Kita tidak selalu impor, bisa juga ekspor,” katanya, Kamis (23/5/2019).

Selain itu, lanjut Bahlil, menunjukkan sektor pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar dunia. Dengan derasnya impor, seperti jagung akan berpengaruh terhadap daya saing harga di tingkat petani.

Kunjungan Mentan Brazil

Di hari berikutnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima kunjungan Mentan Brazil Tereza Cristina di Kantor Pusat Kementan, Senin (20/5/2019). Kunjungan bilateral ini terdapat beberapa kesepakatan penting, di antaranya pembahasan ekspor-impor dua negara. “Beberapa komoditas strategis kita seperti salak, manggis, dan lain-lain diberi ruang untuk ekspor ke Brazil,” ujar Amran.

“Mereka (Brazil) membuka peluang komoditas strategis untuk kita ekspor dan membuka sekitar enam komoditas pertanian kita. Tadi tidak dibatasi mana saja yang diekspor ke Brazil,” sambung Amran.

Mentan RI optimistis volume ekspor pangan Indonesia ke Brazil ke depannya semakin melejit. Sebab pada pertemuan ini telah disepakati agar komoditas pertanian Indonesia seperti salak, sarang burung walet, nanas, dan komoditi lainnya harus dapat diterima. “Sampai sekarang ini, ekspor Indonesia ke Brazil mencapai USD 0,3 miliar per tahunnya. Sebagian besar ekspor tersebut disumbang Fruit Palm Oil atau minyak kelapa sawit,” ujarnya.

Selain ekspor, Amran menyebutkan dalam pertemuan ini, Indonesia mengajak Brazil untuk investasi di tanah air khususnya sektor pertanian, salah satunya pengembangan pabrik gula. **(tim humas)**





RI-THAILAND

Rajut Kembali Organisasi Antar-Pemerintah

PEMERINTAH RI bersama dengan Pemerintah Thailand bersepakat untuk melakukan kembali harmonisasi, dan merajut kembali upaya pembentukan organisasi antar-pemerintah baru. Kesepakatan tersebut diputuskan antar kedua negara di sela pertemuan tahunan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ke-75 di Bangkok, Thailand pada 27-31 Mei 2019. Delegasi dari pemerintah dipimpin Kabag Regional Ir Yusral Tahir MA yang bertemu dengan Sekretariat UNESCAP di kantor pusat UNESCAP, Bangkok.

Yusral menyatakan, agenda pertemuan untuk merajut kembali upaya pembentukan organisasi antar-pemerintah. Ini sebagai pengganti the Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) yang mandatnya dipercayakan kepada Indonesia. "Sebagai salah satu badan khusus di bawah PBB, UNESCAP mendapat mandat dari negara anggotanya untuk membantu Indonesia melakukan proses transisi terhadap CAPSA," katanya di Thailand, Selasa (28/5/2019).

Yusral menambahkan, salah satu subsidiary body dibawah UNESCAP, mandat CAPSA telah berakhir pada Juni 2018. Ini berdasarkan keputusan negara anggota pada pertemuan tahunan ke-74 UNESCAP pertengahan 2018. Untuk diketahui, keanggotaan CAPSA sendiri berasal dari Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Pakistan, Papua New Guinea, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Indonesia.

"Transisi CAPSA ini, dipandang perlu oleh negara anggota. Upaya ini dalam rangka menyelaraskan tujuan

organisasi dengan dinamika tantangan, dan kebutuhan negara anggota," jelas Yusral. Olehnya itu, lanjutnya, CAPSA akan bertransformasi menjadi lembaga internasional antar-pemerintah bagi anggota CAPSA dan potensial untuk negara lainnya.

Sekretariat UNESCAP Mr Kaveh Zahedi menjanjikan empat tindak lanjut yang akan dilakukan UNESCAP dalam membantu proses transisi CAPSA tersebut. Keempat poin tindak lanjut tersebut antara lain pertama, semua aset dan keuangan akan diserahkan kepada organisasi baru. Namun sebelumnya, harus sesuai prosedur yang ada di UNESCAP berdasarkan resolusi sidang ke-74. Kedua, terkait aspek keuangan eks CAPSA, pihak UNESCAP menjelaskan bahwa sisa anggaran eks CAPSA baru dapat dimanfaatkan jika telah terbentuk organisasi baru, dan tidak ada toleransi atas kebijakan tersebut.

Ketiga, Sekretariat UNESCAP telah mengidentifikasi nama-nama tenaga ahli, baik dari Indonesia maupun dari negara lain yang memiliki pengalaman dalam pembentukan organisasi internasional sejenis. Keempat, Sekretariat UNESCAP akan mengirimkan daftar nama-nama focal point eks CAPSA, untuk mempermudah Indonesia dalam membangun komunikasi baru dengan negara-negara eks CAPSA, hingga mendapatkan dukungan. **(tim humas)**



URGENSI DIVERSIFIKASI PANGAN DI INDONESIA

Oleh : *Kuntoro Boga Andri**

INDONESIA merupakan negara tropis dengan kekayaan biodiversitas agraris. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya berupa ragam sumber hayati penghasil karbohidrat tinggi. Bila dibandingkan negara lain, kita perlu bersyukur karena Indonesia mustahil kekurangan bahan pangan. Di segala penjuru, terdapat tanaman pangan lokal yang tumbuh subur. Masyarakat kita sangat bijaksana dan memiliki pengetahuan yang tinggi dalam memanfaatkan alam untuk kehidupan, menjaga kesuburan tanah, dan kelestarian lingkungan.

Keragaman sumber hayati penghasil karbohidrat tersebut masih sangat berpotensi untuk dikembangkan, terutama untuk menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat pada komoditas beras. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada beras, cukup merepotkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pemerintahan yang memimpin negeri ini dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Padahal 40 tahun lalu masyarakat Indonesia di beberapa daerah masih terbiasa memakan komoditas pangan non beras, seperti jagung, ubi jalar, atau sagu sebagai makanan pokok sehari-hari. Tak hanya dari komoditas pangan, karbohidrat juga sebetulnya bisa diperoleh dari buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Konsumsi ragam sumber hayati tersebut berkontribusi kepada raga yang sehat dan kuat, serta otak yang cerdas.

Pada 1954 komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5 persen, sisanya dipenuhi dari ubi kayu (22,6 persen), jagung (18,9 persen), dan kentang (4,99 persen). Kondisi tersebut mulai berubah pada era orde baru. Di awal akhir tahun 80-an, proporsi beras semakin dominan mencapai 81,1 persen, sisanya ubi kayu (10,02 persen) dan jagung (7,82 persen).



Sejak era Orde Baru, beras semakin didorong untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia, meskipun saat itu ada kearifan pangan lokal, seperti jagung di NTT dan Sulawesi, sagu di Maluku dan Papua, dan ubi jalar di Papua. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi beras per kapita kita menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2017, konsumsi beras Indonesia sebesar 114,6 kg per kapita per tahun, jauh di atas konsumsi penduduk konsumen beras dunia yang rata-rata hanya 60 kg per kapita per tahun. Saat ini, mayoritas masyarakat mengonsumsi nasi, padahal ada 100 jenis makanan karbohidrat, dari kentang, singkong, sagu, terigu, dan lain-lain. Indonesia masih tertinggal dalam persoalan diversifikasi pangan bila dibandingkan negara lain seperti Korea (40 kg per kapita per tahun), Jepang (50 kg per kapita per tahun), Malaysia (80 kg per kapita per tahun), atau Thailand (70 kg per kapita per tahun).

Bahkan sejak 2010, pangsa pangan non beras nyaris hilang, tetapi tergantikan dengan konsumsi terigu yang mencapai 17 kg per kapita per tahun, atau naik sebesar 500% dalam kurun waktu 30 tahun.

Sejarah Diversifikasi Pangan

Sejak masa awal kemerdekaan, Presiden RI pertama Soekarno sudah mempermasalahkan konsumsi pangan nasional yang didominasi beras. Ketika mulai menjabat sebagai presiden, ia pun begitu gencar mewanti-wanti soal keamanan, ketahanan, dan keragaman pangan.

Dalam pidato kepresidenannya bertajuk Tahun Vivere Pericoloso pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 1964, ia bersaran, "Kepada yang biasa makan nasi 2-3 kali sehari saja serukan: Ubahlah menu, tjampurlah dengan djagung, ketela-rambat, singkong, ubi, dan lain-lain. Hanja ini jang kuminta -mengubah menu, jang tidak akan merusak kesehatanmu."

Sepanjang 1950-an, para ahli pangan serta ahli gizi mencoba untuk membuat rumusan ideal dalam mengurus secara integral perbaikan pangan, menu makan, hingga kesehatan sebagai bagian dari identitas nasional. Pada saat itu juga dicanangkan konsep populer bernama "Empat Sehat Lima Sempurna".

Meragamkan pangan untuk dijadikan sebagai standar pangan nasional sebagaimana dimaksudkan Soekarno bukanlah sekadar urusan perut. Menteri Koordinator Pertanian dan Agraria pada era pemerintahan 1963-1966, Sadjarwo, menyampaikan ragam pangan dimaksudkan juga untuk "menambah rasa menghargai antardaerah dan rasa persatuan antarbangsa". Misalnya, sagu yang biasa dikonsumsi orang-orang di

Ambon bisa dibudidayakan dan dibiasakan dikonsumsi di Jawa. Atau ubi yang jadi bahan makanan pokok di Papua, bisa dibudidayakan dan dibiasakan dikonsumsi di Sumatera.

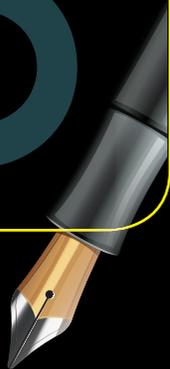
Semangat diversifikasi pangan yang diusung Presiden Soekarno tidak dilanjutkan pada pemerintah berikutnya. Perkembangan pangan Indonesia di bawah rezim Soeharto yang mengusung program swasembada beras telah memudarkan program keragaman pangan yang ditata sebelumnya pada masa Soekarno. Jadi, jangan heran jika kasus-kasus kelaparan sempat terjadi di kawasan timur Indonesia karena ketergantungan pada beras di sana sudah begitu mengkhawatirkan. Dan secara perlahan, memori kolektif masyarakat terhadap sumber daya pangan lokalnya menjadi terkikis.

Terkikisnya memori ini turut berdampak pada potensi kepunahan spesies. Keberadaan sumber hayati non beras, seperti sorgum, jewawut, dan sagu menjadi tersingkirkan. Berdasarkan catatan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB-Biogen) Kementan, sebanyak 24 persen dari 4.000 spesies sumber pangan liar di ambang kepunahan. Untuk mencegahnya pemerintah secara cepat melakukan penyelamatan sumber daya hayati tanaman pangan di Indonesia melalui bank gen. BB-Biogen saat ini memiliki 10.000 aksesi (koleksi sumber genetika tanaman pangan dan pertanian yang didata) dari total 30.000 aksesi yang dimiliki Indonesia.

Pada era pemerintahan Jokowi - JK, semangat diversifikasi pangan dan mempertahankan keragaman sumber hayati memang kembali digaungkan secara kencang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai masyarakat kurang mengonsumsi protein dari sumber pangan hewani, maupun mengonsumsi sayur dan buah. Untuk mengatasi itu, dibutuhkan strategi untuk memperkuat penganeekaragaman atau diversifikasi pangan di Indonesia. Menurut Amran, jika kondisi ini tetap dibiarkan, generasi penerus Indonesia akan memiliki daya saing yang kecil dibanding negara lain.

Mentan mengatakan permasalahan pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih jauh dari kata ideal. Saat ini konsumsi karbohidrat didominasi padi-padian. Sementara potensi sumber daya pangan Indonesia cukup berlimpah. Terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan. Mentan meyakini jika bisa dikelola dengan baik, keanekaragaman pangan lokal yang kita miliki tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tapi juga memenuhi kebutuhan dunia.

Jika konsumsi pangan masyarakat lebih beragam, dampak positifnya lainnya adalah, petani akan menganeekaragamkan usahatani, pengolahan



pangan lokal di pedesaan akan tumbuh berkembang, dan bisnis kuliner berbahan baku pangan lokal juga semakin banyak dan digemari.

Menggiatkan Diversifikasi Pangan Lokal

Upaya mengedukasi masyarakat agar mengurangi konsumsi beras dan mengalihkannya ke konsumsi pangan yang lebih beragam ini sangat penting untuk dilakukan. Salah satu jalannya adalah mengembalikan pangan lokal khususnya daerah-daerah Indonesia Timur dan daerah lain yang awalnya konsumsi utamanya adalah pangan lokal.

Untuk mempercepat keberhasilan penganeekaragaman pangan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Berbasis Sumberdaya Lokal. Kedua peraturan ini merupakan landasan hukum yang bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan penganeekaragaman pangan.

Sebagai bentuk konkret untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah melakukan kegiatan nyata di lapangan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Optimalisasi Lahan Pekarangan (OPAL) yang saat ini sudah tersebar sebanyak puluhan ribu titik di seluruh Indonesia.

Apa yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sebenarnya bukan hanya sebatas peraturan. Misalnya, untuk hidangan rapat-rapat dan pertemuan, konsumsi yang disiapkan terbuat dari bahan pangan lokal. Bahkan tidak sedikit pimpinan daerah yang memberi contoh langsung untuk tidak mengkonsumsi nasi baik secara pribadi maupun dalam lingkungan perkantoran untuk mensukseskan program diversifikasi pangan.

Keterlibatan stakeholder ini sangat penting karena permasalahan ini cukup kompleks. Tantangan utama yang dihadapi dalam menggiatkan diversifikasi pangan adalah mengubah pola konsumsi masyarakat dari bahan pangan beras ke non beras. Untuk mengubah pola konsumsi tersebut, maka banyak hal yang perlu disiapkan, antara lain penyediaan bahan pangan non beras, pengolahannya yang harus sesuai citarasa masyarakat, kemasan menarik, dan keterjangkauan harga dengan memperhitungkan daya beli masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut tentu tidak bisa dilakukan oleh satu dua instansi, tetapi harus bersinergi dan melibatkan lintas sektor dan pelaku yang terkoordinasi dengan baik. Dukungan lain yang tidak kalah penting adalah dari industri atau pengusaha pangan. Peran mereka penting, terutama untuk membangun industri pangan berbahan baku lokal seperti singkong, talas, ganyong, sagu dan lainnya untuk diolah menjadi bahan pangan yang siap dimasak atau disajikan dengan cita rasa yang enak, penampilan menarik, kemudahan akses beli, dan harga ekonomis.

Hal ini tentu saja memerlukan komitmen tinggi dari jajaran pimpinan di pemerintahan, untuk menjadikan prioritas utama dalam menyukseskan program penganeekaragaman pangan melalui sinergi dalam wadah koordinasi yang baik dan secara berkesinambungan. (*)

**Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik, Kementan*

Bio Urine, Solusi Go Green

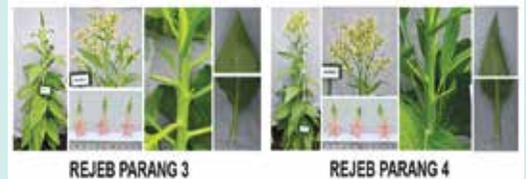
INOVASI

PENCEMARAN lingkungan sudah menjadi permasalahan global yang menyita perhatian banyak pihak. Mengatasi hal tersebut, gerakan Go Green marak diangkat menjadi salah satu solusi dari permasalahan alam tersebut. Dalam dunia pertanian, Go Green bisa diupayakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk organik yang ramah lingkungan dan mudah pengaplikasiannya.

Balitbangtan melalui BPTP yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan institusi yang gencar mendiseminasikan manfaat dari penggunaan pupuk organik yang diketahui sebagai pupuk multifungsi. Selain bermanfaat bagi tumbuhan, salah satunya dengan merangsang pertumbuhan akar tanaman pada benih/bibit, pupuk organik apabila dicampur pestisida organik bisa membuka daun yang keriting akibat serangan thrip. Manfaat lainnya adalah mencegah datangnya berbagai hama tanaman. Selain itu, bio urine juga dapat menjaga kesuburan tanah dengan cara memperbaiki struktur kandungan organik tanah.

Jika ada yang masih ragu dengan kehebatan pupuk ini, mari lihat lagi kelebihan lainnya. Pupuk cair bio urine dapat secara cepat mengatasi defisiensi hara dengan kandungan nitrogen, fosfor, kalium dan air lebih banyak jika dibandingkan dengan kotoran sapi padat. Dengan menggunakan pupuk ini, volume penggunaannya lebih hemat dibandingkan pupuk organik padat, serta aplikasinya lebih mudah karena dapat diberikan dengan penyemprotan atau penyiraman. Selain itu, pupuk cair bio urine mudah dibuat dan lebih murah harganya.

Urine sapi tidak dapat langsung digunakan untuk memupuk tanaman, melainkan harus diolah terlebih dahulu untuk menambah nilai manfaatnya. Selain bermanfaat bagi petani, kegiatan pembuatan pupuk organik dari urine sapi ini juga berpotensi menjadi satu peluang usaha yang menguntungkan bagi para peternak. Limbah hasil ternak yang awalnya terbuang sia-sia dan tak jarang menjadi penyebab pencemaran lingkungan, kini bisa diubah menjadi pupuk yang sarat manfaat dan dicari pasar. **(sumber BPTP Kaltim, BPTP Babel, BPTP Bali)**



Lebih Unggul, Ini Varietas Baru Tembakau Magetan

TEMBAKAU Rajangan Magetan merupakan tembakau rakyat yang diproses secara rajangan. Tembakau ini sudah berkembang sejak 1910 di wilayah Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dengan luas areal rata-rata 300 – 750 ha per tahun. Pada November 2017, varietas Rejeb Parang dirilis sebagai varietas unggul lokal tembakau Magetan dengan nama Rejeb Parang 3 dan Rejeb Parang 4.

Rejeb Parang 3 dengan produktivitas rajangan kering 0,35 – 1,13 ton/ha, indeks mutu 49,97 – 74,58, indeks tanaman 21,01 – 90,13, kadar nikotin 2,93 – 5,20 persen serta moderat terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae*) dan rentan terhadap penyakit layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*). Rejeb Parang 4 dengan produktivitas rajangan kering 0,39 – 1,14 ton/ha, indeks mutu 48,63 – 82,40, indeks tanaman 26,03 – 96,18, kadar nikotin 3,00 – 5,28% serta tahan terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae*) dan rentan terhadap penyakit layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*).

Mengacu pada UU No 12/1992, PP No 44/1995, dan Permentan No 39/2006 mengamanatkan bahwa benih yang beredar di masyarakat harus bersertifikat dan berlabel. Oleh sebab itu dengan dilepasnya dua varietas unggul tembakau Magetan Rejeb parang 3 dan Rejeb Parang 4 ini akan berdampak pada berkurangnya penggunaan kultivar ilegal, dan sekaligus dapat melakukan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tembakau di Kabupaten Magetan.

Varietas Rejeb Parang 3 telah tersedia benih penjenisannya sebanyak 0,3 kg dan varietas Rejeb 4 tersedia sebanak 0,275 kg. Benih penjenis yang dihasilkan ini akan digunakan untuk perbanyak kelas benih yang lebih rendah yakni benih dasar dan benih sebar. **(Puslitbang Perkebunan)**

B100

DICIPTAKAN KEMENTAN, DIDUKUNG KEMEN ESDM

BARU-BARU ini Kementerian Pertanian (Kementan) melaunching uji coba perdana produk biodiesel 100 persen atau B100 untuk menjawab tantangan global terhadap energi terbarukan melalui penggunaan bahan pertanian. Dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan penggunaan B100 datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM).

Kementan melalui Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) bersama Kementerian ESDM melakukan rencana kerja sama pengembangan dan peningkatan penggunaan B100 pada kendaraan bermotor dan peran masing-masing pemangku kepentingan. Komponen terpenting dalam pengembangan B100 adalah reaktor yang mampu mengolah minyak nabati menjadi B100 yang memenuhi standar SNI.

"Salah satu reaktor biodiesel yang ada di instalasi produksi biodiesel Balittri adalah reaktor multifungsi yang memiliki kapasitas olah 400 liter per lima jam, menghasilkan minyak nabati dengan ALB tinggi, dapat mengolah berbagai jenis minyak nabati, dilengkapi methanol recovery dan memiliki monitor display untuk melihat pemisahan biodiesel dari gliserol dalam tabung pemisah di bawah tabung reaktor," ujar Deden Syafaruddin, kepala Balitri dalam Rapat Pertemuan Koordinasi peningkatan penggunaan B100 pada kendaraan bermotor dengan Kementerian ESDM di ruang rapat Balitri (8/5/2019.)

Deden menjelaskan bahwa B100 merupakan biodiesel dengan kandungan 100 persen bahan bakar nabati. B100 yang telah mulai digunakan untuk mobil dinas dan alat pertanian di lingkup Kementerian Pertanian ini merupakan B100 yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah. B100 berbahan CPO ini telah dianalisa di Laboratorium Lemigas dengan hasil telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 7182-2015. Pengembangan B100 dari CPO ini merupakan langkah strategis Pemerintah untuk dapat mengontrol harga ekspor-impor harga

minyak sawit dunia sekaligus salah satu jalan keluar adanya black campaign dari masyarakat Erofa kepada persawitan Indonesia.

Balittri tidak hanya menghasilkan B100 berbahan baku CPO, akan tetapi telah menghasilkan B100 dari berbagai macam tanaman penghasil biodiesel seperti kemiri sunan, jarak pagar, biji karet, bintaro, nyamplung, pongamia, kepuh dan kesambi. Diantara tanaman-tanaman tersebut kemiri sunan merupakan tanaman penghasil biodiesel yang paling potensial. Selain menghasilkan BBN tanaman kemiri sunan juga dapat ditanam di aeral suboptimal, reklamasi lahan bekas tambang, penyerap karbon dan penahan air tanah yang baik.

"Dalam rapat pertemuan koordinasi tersebut peserta dari Kemen ESDM menyempatkan untuk mengunjungi instalasi produksi biodiesel di wilayah Agrowidya Wisata Ilmiah (AWI) Balittri. Komponen terpenting dalam pengembangan B100 adalah reaktor yang mampu mengolah minyak nabati menjadi B100 yang memenuhi standar SNI," ucap Deden. (tim humas)



PERTANIAN INDONESIA

Siap Hadapi Era

INDUSTRI 4.0

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang akan berdampak pada segala bidang, termasuk pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan terus berinisiatif menggenjot produktivitas pertanian di bidang pertanian untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Dunia saat ini telah memasuki era Revolusi Industri yang keempat, ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis yang terintegrasi dengan jaringan internet. Sektor pertanian juga perlu beradaptasi untuk menjawab tantangan ke depan.

"Ke depan olah lahan, tanam, panen hingga pengolahan dilakukan menggunakan remote control dari rumah," ujarnya dalam kunjungan kerja ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan), Serpong, Banten pada Selasa (14/5/2019).

Mekanisasi pertanian merupakan salah satu komponen penting untuk pertanian modern dalam mencapai target swasembada pangan berkelanjutan.

Sementara dalam dalam Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementan yang mengangkat tema 'Sinergi Membangun Pertanian 4.0' di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (27/5/2019), Mentan meminta UPT di Kementan harus mampu membangunkan atau mengoptimalkan lahan pertanian dan kebun percobaan, sehingga menjadi contoh dalam

membangun pertanian 4.0. Dengan demikian, sektor pertanian Indonesia akan semakin maju dan menjadi lumbung pangan dunia semakin optimistis diwujudkan.

"Bapak-ibu, kenapa tiba-tiba aku panggil, kami keliling ke seluruh Indonesia, kami ingin Anda menjadi agen pembaharu di tempat anda dan menjadi teladan," ujar Amran.

"Kami membayangkan seluruh UPT se-indonesia ramai dikunjungi orang ramai dikunjungi orang di sekitarnya, jadi betul-betul memberi memberi nilai tambah kepada masyarakat sekitarnya, bukan terjadi sebaliknya," tandasnya.

Dr Fadry Djufry, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan mengatakan, era Revolusi Industri 4.0 dicirikan dengan operasionalisasi sistem usaha pertanian berbasis Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), serta Cyber Physical Systems (CPS).

Untuk itu ia mengajak seluruh pemangku kepentingan Balitbangtan, termasuk dari kalangan akademisi untuk ikut berkontribusi dalam mempersiapkan diri memasuki era industri 4.0 ini. "Balitbang beserta segenap stakeholder, termasuk akademisi di Perguruan Tinggi untuk bersama-sama berkontribusi dalam menggagas pemikiran-pemikiran untuk memformulasikan strategi adaptasi dan transformasi menuju era industri 4.0." tegasnya saat menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-59 Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (17/5/2019). **(tim humas)**



Melalui Pertanian JADI JUTAWAN MUDA

PETANI ataupun pekerjaan di sektor pertanian pada umumnya masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat. Bertani identik dengan pekerjaan kasar, kotor-kotoran, ataupun penghasilan rendah. Akibatnya, regenerasi petani terhambat. Tak banyak anak muda yang tertarik bertani.

Tapi kondisi ini perlahan berubah. Setidaknya sejumlah anak muda yang terjun ke sektor pertanian berhasil membuktikan bahwa sektor pertanian ternyata bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Salah satunya Mardiana, salah satu agropreneur komoditas jamur tiram asal Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mardiana menyebutkan saat ini bisnis budidaya dan pengolahan jamurnya sudah menghasilkan omzet Rp 90 hingga Rp 120 juta setiap bulannya. "Padahal awalnya modal saya cuma Rp 1 juta," ungkapnya saat menjadi pembicara Bincang Asyik Pertanian (Bakpia) di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa, Jumat (17/5/2019).

Usaha Mardiana sudah berlangsung selama sembilan tahun. Tiga tahun pertama, ia sempat kesulitan menembus pasar Makassar. Bagi mayoritas masyarakat Makassar saat itu, jamur masih identik dengan racun. Tapi Mardiana tak pantang menyerah. Sama halnya dengan Ariesman, agropreneur asal Makassar yang juga membuktikan pertanian bisa menjadi bisnis yang menggiurkan. CV Akar Hidroponik yang digerakkannya juga bisa menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. "Kami sekarang ini sudah bisa memproduksi 20 hingga 30 kg setiap bulan. Setidaknya

ada 13 jenis sayuran yang kami produksi," jelasnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus membuktikan komitmennya dalam mencetak petani-petani muda dari generasi milenial di segala penjuru Indonesia, termasuk di Sulsel. Keseriusan itu diwujudkan dalam sejumlah kebijakan dan program. Salah satu bukti nyatanya adalah mengubah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) menjadi Polbangtan (Politeknik Pembangunan Pertanian). Perubahan berimplikasi pada sejumlah hal substansial, antara lain kurikulum. "Bila dulu kurikulum diisi teori sebanyak 60 persen dan sisanya praktik, sekarang justru sebaliknya. Kurikulum didominasi praktik dan hanya menyisakan 30 persen teori," jelas Syaifuddin, direktur Polbangtan Gowa.

Dengan perubahan komposisi muatan praktik dan teori, penyusunan kurikulum tidak sepenuhnya diserahkan kepada internal Polbangtan. Pihak swasta dan perguruan tinggi juga ikut dilibatkan. "Kami siapkan modal sekitar Rp 15-30 juta bagi mahasiswa Polbangtan yang tertarik menjadi agropreneur," ungkap Syaifuddin.

Sementara itu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) mendukung gebrakan Mentan Amran mencetak petani milenial. "Pada tahun ini Mentan bertekad menciptakan 1 juta petani milenial. Bagi kami, ini jalan baru kebangkitan sektor pertanian, karena petani milenial tidak hanya bertani, tapi juga sekaligus menjadi pelaku usaha muda," ujar Pri Menix De, wakil sekjen Bidang Kemaritiman dan Agraria saat buka puasa bersama Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/5/2019). **(tim humas)**



RESISTENSI Antimikroba (AMR) telah menjadi ancaman global bagi kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan. Ini terjadi karena munculnya bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang disebabkan penggunaan antibiotik yang tidak bijak dan tak bertanggung jawab di berbagai sektor seperti kesehatan masyarakat, peternakan, dan kesehatan hewan, pertanian serta perikanan.

Berdasarkan studi dari World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia pada 2014, diperkirakan angka kematian akibat AMR dapat mencapai 10 juta jiwa pada 2050 bila tidak ada pengendalian AMR. Untuk mencegah bertambahnya kerugian dan memperlambat laju AMR ini diperlukan langkah-langkah strategis berbagai sektor kesehatan dan sektor terkait lainnya.

“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan kementerian terkait telah mengambil langkah strategis dengan adanya Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN PRA) 2017-2019 yang merupakan tidak lanjut dari Rencana Aksi Global yang disusun setelah isu AMR menjadi salah satu pokok bahasan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2016,” ujar Ni Made Ria Isriyanthi, dokter hewan Technical Service dari Direktorat Kesehatan Hewan mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan dalam seminar ‘Peningkatan Kesadaran tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba’ yang diselenggarakan Kementan bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Asosiasi Obat Hewan Indonesia, serta Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tersebut, Rabu (8/5/2019).

Lebih lanjut, Kementan telah melakukan kegiatan peningkatan



kesadaran dan pemahaman terkait resistensi antimikroba sejak 2016 melalui kegiatan Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia, seminar bagi mahasiswa kedokteran hewan di 11 universitas di Indonesia, seminar bagi peternak unggas melalui sarasehan, Expo dan pameran (Indolivestock, ILDEX dan Sulivec) dengan melibatkan sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

“Kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait AMR juga telah dilakukan untuk para stakeholder secara bertahap dari 2017 hingga sekarang,” tambah Ria,

FAO Mengapresiasi

Food and Agriculture Organization (FAO) atau Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan apresiasi kepada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan yang telah berhasil dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit Avian Influenza (AI) atau yang lebih dikenal sebagai flu burung.

“FAO telah mendukung program Pemerintah Indonesia dalam pengendalian dan penanggulangan flu burung sejak 2006. Sepanjang kerja sama selama 13 tahun ini, kami mengapresiasi angka kasus penyakit flu burung yang terus menurun,” kata Stephen Rudgard, FAO Representative to Indonesia and Timor Leste dalam pertemuan dengan Dirjen PKH I Ketut Diarmita di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Kementan mencatat, angka tahunan kasus flu burung turun dari 2751 pada 2007 ke 476 pada 2018. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza yang menyerang semua jenis unggas domestik, termasuk ayam, bebek, dan burung puyuh, serta diketahui dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. **(tim humas)**

BRIGADE ALSINTAN, Strategi Jitu Garap Lahan Rawa

BARITO Kuala: Istilah brigade tidak selalu identik dengan militer. Di Indonesia istilah ini kini digunakan pada pembangunan pertanian, untuk menggambarkan cara penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang lebih efektif dan efisien di lahan rawa.

Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman menegaskan, bantuan ekskavator yang diberikan Kementan untuk mengoptimasi lahan rawa di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan (Kalsel) harus digunakan secara berkelompok seperti brigade.

Menurutnya, hanya dengan cara ini penggunaan ekskavator dapat lebih maksimal dengan biaya yang lebih hemat. Dia menginginkan ada enam sampai enam ekskavator yang mengerjakan satu lokasi sekaligus. Dengan bergerak dalam tim, pengawasannya akan mudah dan murah. Sedangkan jika bekerja sendiri-sendiri, biayanya akan mahal karena butuh pengawas yang banyak.

"Mau yang mudah dan murah atau yang susah dan mahal? Tolong ikuti prosedur. Satu lokasi kerjakan dengan lima ekskavator sekaligus, sehingga cepat Bergeraknya. Beda kalau satu lokasi hanya satu mesin. Beda spiritnya. Dalam satu brigade lebih cepat," ujar Amran saat meninjau perkembangan program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) di Kabupaten Batola, Sabtu (25/5/2019).

Selain Kalsel, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, daerah yang memiliki lahan rawa yang cukup luas, yakni Sulawesi



Tengah, khususnya Kabupaten Toli-Toli seluas 5.000 ha. "Kami harapkan potensi lahan rawa yang cukup luas ini bisa dibangun menjadi lahan pertanian produktif. Tentunya bantuan berupa anggaran Kementan kami harapkan di tahun ini maupun tahun depan bisa ada," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli Rustan Rewa saat berkunjung ke Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Kunjungan ini diterima Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Prof Dedi Nursyamsi.

Sementara itu, produktivitas pertanian selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini terlihat dari nilai rata-rata indeks pertanian dan pertanaman (IP) yang mencapai 0,5 dengan hasil produksi sebanyak 8,21 juta ton.

Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhi menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah buah kerja keras semua pihak, terutama para petani yang sudah menggunakan bantuan alsintan, benih, dan bibit. "Dalam hal ini, bantuan tersebut berhasil mengembangkan jaringan irigasi tersier yang mengairi lahan sawah seluas 3,129 juta ha," katanya dalam diskusi 'Capaian Dirjen PSP' di Gedung D Kementan, Selasa (21/5/2019).

Edhi menambahkan, ketersediaan alsintan yang mumpuni dan mencakup di semua wilayah sangat memudahkan pembangunan dan pengembangan Program Serasi. "Untuk Serasi, jenis kegiatannya berupa SID, rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan alsintan pra dan pasca panen, bantuan Saprodi dan pengembangan usaha. Kegiatan ini juga melibatkan TNI-AD untuk memastikan pengerjaan berjalan dengan baik," katanya. "Nah, tahun ini kita diberi target sama Pak Menteri (Andi Amran Sulaiman) untuk menyelesaikan sisa lahan Serasi yang belum tergarap," ujarnya. (tim humas)

Kejar Swasembada Daging Sapi 2026,

KEMBANGKAN BELGIAN BLUE

PENGEMBANGAN

sapi Belgian Blue (BB) merupakan salah satu peluang yang memberikan harapan bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani dan mengurangi ketergantungan impor daging. "Ini keseriusan kita berswasembada daging sapi pada 2026, maka melalui introduksi dan pengembangan Belgian Blue agar terbentuk rumpun sapi baru Indonesia," jelas Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diamirta dalam kegiatan Evaluasi Pengembangan Sapi Belgian Blue di Indonesia di Bogor, Jawa Barat pada 15-17 Mei 2019.

Diarmita mengatakan, rata-rata berat kelahiran BB murni 52,4 kg, dan BB persilangan antara 27-55 kg. Kemudian pertambahan berat badan harian 1,2-1,6 kg/hari, serta bobot sapi jantan dewasa bisa mencapai 1.100-1.250 kg, maka Belgian Blue adalah salah satu pilihan masa depan pengembangan sapi potong di Indonesia.

Sementara itu, Kementan tengah mempercepat pencapaian swasembada protein melalui peningkatan kualitas data peternakan secara online menuju Pertanian 4.0. Hal ini penting mengingat permintaan terhadap daging sapi terus meningkat akibat membaiknya pendapatan dan berubahnya pola konsumsi pangan masyarakat.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Setjen Kementan I Ketut Kariyasa mengatakan, program terobosan yang tengah dijalankan, yakni Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau di Indonesia, yang dikenal dengan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB). Untuk menunjang program ini, perlu mengetahui data populasi sapi dan kerbau yang akurat dan terkini. Karena itu, perlu terobosan pendataan sapi dan kerbau melalui pelaporan data secara online melalui Informasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS).

"Kami telah menyusun pedoman pendataan populasi sapi dan kerbau secara online melalui ISIKHNAS ini. Uji coba pendataan menggunakan sistem ini telah berhasil



dilaksanakan di DKI Jakarta pada Februari 2019," ujarnya di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Di lain pihak, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) untuk menciptakan teknologi dan inovasi agar kemandirian pakan dapat terwujud khususnya pakan ayam kampung atau petelur.

Menurut Amran, hal ini penting guna mendukung Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) yang sudah berjalan, sehingga kebutuhan pakan ayam petelur yang telah dibagi ke masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri oleh masyarakat. "Intinya sekarang kita sudah bagi ayam ke masyarakat dan ayamnya sudah bertelur. Kita akan melakukan pendampingan dan memberikan pakan gratis sampai enam bulan. Sekarang kita sudah melakukan pendampingan untuk membuat pakan secara mandiri, supaya masyarakat bisa membuat sendiri pakannya. Itu target kita, sehingga nanti tidak ada ketergantungan dari pemerintah kemudian ketergantungan dari luar negeri apalagi barang-barang impor," ujarnya di sela acara peresmian Unit Perbanyak Bibit Sumber (UPBS) di Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor, Rabu (15/5/2019).

UPBS merupakan unit pembibitan ayam kampung untuk memperbanyak bibit ayam kampung unggul yang dikembangkan hingga ke masyarakat. Melalui UPBS ini pun, Kementan akan mencetak masyarakat yang dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pakan ternaknya. (tim humas)

Usulan Pembebasan PPN

PERKEBUNAN DAPAT DUKUNGAN



Kementan Prioritaskan Kesejahteraan Pekebun

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan bersama sejumlah pihak terkait membahas usulan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk perkebunan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Pembebasan PPN merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Rapat usulan pembahasan ini dipimpin Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil (PPH) Perkebunan Dedi Junaedi dan dihadiri lebih dari 70 peserta dari berbagai instansi seperti Badan Kebijakan Fiskal, Biro Hukum Kementerian Pertanian, Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, perwakilan dari dewan-dewan komoditi serta asosiasi terkait lainnya.

Dedi menuturkan, rapat tersebut bertujuan untuk membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan. Ini terkait putusan Mahkamah Agung (ma) nomor 70P/HUM/2013 yang menganulir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31/2007

tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. "Kesejahteraan pekebun merupakan prioritas Ditjen Perkebunan. Di saat semua harga komoditas perkebunan sedang mengalami penurunan, pembebasan PPN merupakan salah satu alternatif insentif bagi pekebun agar dapat lebih berdaya saing secara ekonomi," ujarnya.

Usulan pembebasan PPN itu mendapat dukungan dan disambut baik berbagai dewan dan asosiasi komoditi perkebunan. Misalnya, Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP) Aziz Pane mengatakan, kebijakan pembebasan PPN untuk produk perkebunan sudah ditunggu-tunggu sejak dulu. Pasalnya, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pekebun.

Senada dikatakan Wakil Dewan Teh Indonesia Rachmat Badrudin. Menurutnya, pembebasan PPN komoditas perkebunan merupakan langkah yang tepat di tengah menghadapi persaingan perdagangan global komoditas perkebunan yang semakin kompetitif.

Perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan, Kementerian Keuangan mendukung

usulan kebijakan yang pro petani dan pekebun. BKF menilai pengaktifan kembali usulan fasilitas pembebasan pengenaan PPN terhadap barang hasil perkebunan yang tercantum dalam PP Nomor 31/2007 akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil. Perlu diketahui, rapat ini menyepakati sebanyak 23 komoditas perkebunan untuk diusulkan dibebaskan dari pengenaan PPN, di luar dari komoditas kelapa sawit.

Sementara itu, Ditjen Perkebunan Kementan terus berupaya meningkatkan dan memperkuat database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN). Salah satunya dengan mengadakan kegiatan Workshop Database SIPERIBUN. "Aplikasi database SIPERIBUN merupakan suatu sistem informasi berbasis teknologi yang dikembangkan dan dikelola Ditjen Perkebunan Kementan atas kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Irmijati Rahmi Nurbahar dalam Workshop Database SIPERIBUN di Aceh, Selasa (30/4/2019).

Di lain pihak, Kementan mendorong petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) berperan strategis mengawal kejayaan perkebunan nasional. Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan Antarjo Dikin menjelaskan, petugas penilai atau auditor mempunyai peran penting dalam tata kelola kebun yang baik. "Ini merupakan salah satu peran pemerintah dalam melakukan pengawasan di samping fungsi pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/5).

Ditjen Perkebunan telah menggelar pelatihan petugas PUP pada 21-27 April 2019 di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta. Pelatihan diikuti 85 peserta dari 27 provinsi dan kabupaten/kota

yang menangani bidang perkebunan dan pusat.

Sementara untuk pengembangan perkebunan dalam kurun enam tahun mendatang, 2019-2024, Ditjen Perkebunan menyiapkan 500 juta bibit unggul. Bibit yang dikemas dalam Program Bun 500 ini nantinya untuk program peremajaan tanaman yang sudah tua, rehabilitasi tanaman dan perluasan tanaman di sentra-sentra perkebunan.

Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, pihaknya akan menyiapkan bibit unggul sekitar 83-85 juta batang per tahun. Bibit tersebut diharapkan bisa meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan. Seperti kopi yang saat ini produktivitasnya hanya 0,72 ton/tahun/ha, dengan bibit unggul tersebut produktivitas kopi yang ditanam pekebun bisa meningkat menjadi 3,5 ton/tahun/ha.

Menanggapi beberapa kritikan masyarakat terkait belum sinkronnya data perkebunan sawit di Indonesia, Ditjen Perkebunan melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Irmijati Rahmi Nurbahar menyatakan, saat ini sedang dilakukan sinkronisasi untuk memperoleh satu data secara nasional dengan metodologi yang disepakati. Kementan Bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang melakukan konsolidasi data melalui penyamaan metodologi.

Secara khusus Kementan memang telah mempublikasi data luas areal publikasi kelapa sawit seluas 14.327.093 ha. Data tersebut diperoleh melalui metode sensus, survey atau sampling, administrasi report dan sistem database secara online. "Kami melakukan metodologi administrasi secara berjenjang mulai dari level terendah mantri perkebunan di kecamatan," jelas Irmijati. **(tim humas)**



TERIMA KASIH

dari MENTAN AMRAN

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar acara silaturahmi dan buka bersama keluarga besar Kementerian Pertanian (Kementan) dan pelbagai pihak penting di antaranya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, pers, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Kerukunan Keluar Sulawesi Selatan (Sulsel), dan pihak terkait lainnya. Buka puasa bersama ini berlangsung di Auditorium Kementan dengan mengusung tema Pererat Ukhuwah Islamia di Era Industri 4.0, Senin (27/5/2019).

"Kita buka puasa bersama dengan seluruh asosiasi yang terkait dengan pertanian. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang terkait pertanian dimana harga pangan stabil, sehingga semua menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan ini tenang dan menikmati dengan baik," ujar Mentan Amran saat memberikan sambutan.

Pada kesempatan ini, Amran menegaskan di bulan Ramadhan ini tidak ada gejolak harga. Walaupun ada yang bergejolak sedikit, yaitu bawang putih yang terjadi hanya di awal bulan Ramadhan saja. Namun, pada hari kesatu hingga ketiga, harga bawang putih sudah stabil,

bahkan sangat stabil karena target awalnya hanya Rp 23.000 per kg. Alhasil, baru-baru ini bersama dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) harganya sudah turun menjadi Rp 19.000 per kg. Tidak hanya bawang putih, harga komoditas lainpun turut terjaga.

"Sebelum lebaran dan sesudah lebaran bisa kami pastikan aman. Kenapa? Karena harga beras turun, harga cabai turun, kasian petani, kami minta bulog menyerap dan kami koordinasi Pak Buwas dan alhamdulillah mereka sudah serap cabai harga Rp 8.000 per kg yang sebelumnya Rp 5.000 di pasar," beber Amran.

Karena itu, dia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pelaku usaha dan seluruh pihak bahkan tak lupa kepada seluruh petani peternak se-Indonesia. "Ini kerja keras kita semua dan tidak lupa ini berkat kita semua. Kami bangga dengan petani-peternak Indonesia karena mereka pahlawan pangan dimana pangan kita sangat stabil," sebutnya.

Amran pun turut mengungkapkan keberhasilan pembangunan sektor pertanian selama pemerintahan





Jokowi-Jk, yang merupakan hasil kerja keras jajaran Kementan, petani dan pelbagai pihak terkait. Misalnya, inflasi bahan pangan berhasil ditekan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,26 persen di 2017. "Capaian lainnya ekspor komoditas pertanian hingga saat ini melonjak 26 persen, nilainya Rp1.700 triliun. Begitu PDB sektor pertanian naik 47 persen, total akumulasi nilainya Rp1.375 triliun atau separuh dari APBN," ungkapnya.

"Ini kerja keras kita semua. Harus dipertahankan dan harus ditingkatkan," pinta Amran. Perlu diketahui, buka puasa ini pun bersama dengan anak yatim, fakir miskin. Ini dilakukam rutin setiap tahunnya. "Kami lakukan setiap tahun. Kami merasa menjadi bapak ibunya mereka," tandas Amran. **(tim humas)**

Swasembada

BAWANG PUTIH

Sudah di Depan Mata

Meningkat Tajam, Optimistis Tercapai 2021

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) optimistis target swasembada bawang putih pada 2021 terwujud. Alasannya terjadi peningkatnya luas tanam yang sangat drastis dan berkembang di banyak daerah dalam dua tahun terakhir. Diharap produksi dalam negeri segera mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini sebagian besarnya dari impor.

"Luas tanam bawang putih pada 2019 hitungan kami sekitar antara 20.000 hingga 30.000 hektar. Kalau tahun depan (2020) kita ada tambahan penanaman lagi sekitar 20.000 lebih hektare (ha) jadi mencapai 40.000 lebih ha. Terakhir pada 2021 kita harus genjot minimal 30.000 ha maka pada 2021 kita mencapai penanaman sekitar 70.000 hingga 80.000 ha. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan bawang putih nasional," ujar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Hortikultura Dr Moh Ismail Wahab dalam Bincang Asik Pertanian Indonesia (BAKPIA) yang dihelat langsung di lahan pertanaman bawang putih di Desa Langensari, Kecamatan, Sukareja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (29/5/2019).

Dia menjelaskan, adanya kepastian produksi tersebut mampu memenuhi kebutuhan sendiri karena total kebutuhan setiap tahunnya mencapai 500.000 hingga 600.000 ton yang dipenuhi dari impor, sehingga luas tanam 80.000 ha jika produktivitasnya 6 ton per ha, hasilnya mencapai 480.000 ton. Dengan demikian, swasembada berhasil diwujudkan karena swasembada itu tidak harus kebutuhan pangan itu dipenuhi 100 persen dari produksi sendiri.

"Artinya produksi sendiri yang 80-90 persen saja kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maka bisa dikatakan sudah mampu

berswasembada. Jadi bawang putih ini bukan hanya masalah impornya saja, tidak hanya sebatas harga yang kemarin naik, tapi lihat sekarang pertanaman bawang putih sudah berkembang di Indonesia, termasuk di wilayah Sukabumi ini," jelasnya.

Ismail menegaskan, kerja keras Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK patut menjadi catatan penting sejarah dalam meningkatkan luas tanam bawang putih. Dari hasil identifikasi ternyata luas bawang putih Indonesia pada 2016 hanya 1.900 ha dan hanya ada di enam lokasi di seluruh Indonesia. Namun demikian, setelah ada Program Upaya Khusus percepatan swasembada bawang putih yang dicanangkan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pada 2016-2017, pertanama bawang putih berkembang di 78 lokasi dengan luasnya mencapai 5.400 ha lebih. Dengan demikian, luas bawang putih menjadi 7.000 lebih ha.

"Kemudian pada 2017-2018 perluasannya dikembangkan lagi menjadi sekitar 8.000 ha lebih untuk 110 kabupaten. Jadi semula itu bawang putih hanya ada di enam kabupaten, sekarang ini sudah ada di sekitar 110 kabupaten pengembangan di wilayah Indonesia. Itulah yang menjadi salah satu optimisme kita untuk swasembada bawang putih," tegasnya.

Dirjen Hortikultura Kementan Suwandi mengatakan, untuk mengembalikan kejayaan white diamond, Kementan menggerakkan kembali petani untuk mau menanam bawang putih. Salah satunya dengan menggandeng importir bermitra dengan petani. "Kemitraan antara petani dengan importir semakin luas. Tahun lalu ada sekitar 40 importir. Namun yang tidak sesuai aturan kita black list," tandasnya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Kementan hingga saat ini masih konsisten menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih. Upaya tersebut merupakan salah satu upaya mencapai target swasembada bawang putih dan melepaskan ketergantungan akut terhadap impor bawang putih. Meski



demikian, pemerintah masih membuka peluang impor bawang putih konsumsi bagi para importir sampai 2021. Kementan membantah memberikan keistimewaan kepada Perum Bulog bisa mengimpor tanpa harus melaksanakan kewajiban tanam.

Tentang hal ini, Kepala Sub Direktorat Bawang dan Sayuran Umbi, Ditjen Hortikultura Kementan Muh Agung Sunusi menegaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan rekomendasi impor dari Perum Bulog. Pihaknya juga membantah memberi keistimewaan kepada pihak-pihak tertentu. "Ada pihak yang menuding Kementan seolah memberikan keistimewaan kepada Perum Bulog dibanding importir bawang putih lain. Tudingan tersebut salah besar dan tidak beralasan. Kementan masih dan akan selalu on the right track menegakkan aturan, tak ada itu pengistimewaan-pengistimewaan," tegasnya di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Sejak pemerintah memprogramkan swasembada bawang putih, petani pun kian bergairah membudidayakan komoditas sayuran ini. Dari awalnya hanya dua kabupaten (Sembalun dan Temanggung), diperkirakan pada 2019 ini akan ada 110 kabupaten yang menanam bawang putih.

Salah satu petani yang mendapat berkah dari budidaya bawang putih adalah Bejo Supriyanto. Petani bawang putih dari Desa Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Bapak dua anak ini mengatakan, saat ini sudah ada beberapa petani bawang putih di Kelurahan Kalisoro yang diajak bekerjasama dengan sejumlah importir bawang putih untuk tanam bawang putih. "Ada sekitar 5 ha yang sudah bekerja sama tanam bawang putih dengan importir dari Semarang," ujarnya.

Kementan juga terus meningkatkan luas areal pertanaman ke daerah yang berpotensi menjadi sentra bawang putih, termasuk Sembalun Lombok Timur, NTB. Sebagai salah satu sentra bawang putih terbesar,

Sembalun memiliki potensi 4.000 ha lahan. Sampai saat ini baru sekitar 2.000 ha yang ditanami bawang putih. Saat meninjau kawasan bawang putih bantuan APBN 2018 seluas 500 ha di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun Lombok Timur, Jumat (17/5/2019), Sekretaris Ditjen Hortikultura Liliek Sri Utami beserta rombongan mengaku optimis swasembada bisa dicapai.

Sementara Pasuruan, Jawa Timur memiliki sekitar 3.000 ha lahan yang cocok untuk bawang putih. "Lahan bawang putih kami sekarang ini biasa di tanam kentang. Nah supaya tidak terus menerus kentang, bawang putih bisa jadi alternatif juga. Penanaman ini dilakukan importir dari kewajiban tanamannya 5 persen," ujar Kepala Bagian Produksi Hortikultura dan Perkebunan Pasuruan Dodi Setiawam di Pasuruan, Sabtu (11/5/2019).

Sedangkan petani asal Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara berhasil mendapat keuntungan dari kegiatan kerja sama budidaya bawang putih varietas Great Black Leaf (GBL). Salah satunya adalah Like Anake Malonda. Ketua Kelompok Tani Jaya asal Desa Pinasungkulan Utara, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minsel menilai budidaya bawang putih di Minsel memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan.

Kementan juga terus memacu produksi bawang merah dan bawang putih guna mencukupi kebutuhan dalam negeri. Salah satunya mendorong sistem budidaya tumpang sari antara bawang merah dan bawang putih di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. "Saat ini di daerah ini ditanami bawang merah dan bawang putih ditanam dengan sistem tumpang sari seluas 500 ha. Potensinya ada 1.000 ha, sehingga masih ada 500 ha lagi yang siap untuk ditanami lagi," Dirjen Hortikultura Suwandi saat meninjau budidaya tumpang sari bawang merah dan bawang putih di Desa Pakarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Kamis (23/5/2019). (tim humas)



Wow

EKSPOR PERTANIAN Semakin Melejit

EKSPOR dan investasi merupakan aspek prime mover atau penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Maka tak heran pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian serius dan memerintahkan jajaran menteri untuk menggarap dan mendorong dua aspek ini secara baik.

Namun di tengah isu melemahnya neraca dagang Indonesia, bukan pekerjaan mudah memuluskan harapan dan perintah presiden tersebut. Di antara kementerian teknis yang dapat melaksanakan perintah itu adalah Kementerian Pertanian (Kementan). "Pada sektor pertanian, arahan presiden tersebut telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk program terobosan. Terbukti di tengah isu neraca perdagangan kita yang defisit, dijawab dengan ekspor pertanian yang mengesankan. Hal yang sama juga terjadi pada investasi sektor pertanian," ujar Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan I Ketut Kariyasa di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Pada 2018, lanjutnya, ekspor produk pertanian meningkat 9 sampai 10 juta ton dibandingkan pada 2013. Volume ekspor produk pertanian 33,5 juta ton pada 2013 dan meningkat menjadi 42,5 juta ton pada 2018, sehingga selama periode tersebut mampu tumbuh sebesar 26,9 persen atau rata-rata 5,4 persen per tahun. Kemudian pada 2014 total volume ekspor produk pertanian sebesar 36,1 juta ton dan pada 2015 meningkat menjadi 40,4 juta ton. Pada 2016, sempat turun menjadi 35,5 juta ton, namun pada 2017 bangkit kembali menjadi 41,3 juta ton, dan 2018 juga tumbuh stabil menjadi 42,5 juta ton. "Hal yang sama juga terjadi pada tahun ini, sampai pada Maret 2019, ekspor produk pertanian menunjukkan kinerja yang membanggakan karena sudah mencapai angka volume ekspor 10,3 juta ton," jelas Kariyasa.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dirasa tidak kenal lelah bekerja guna menciptakan ketahanan pangan nasional dan berpihak pada petani. Sejumlah program pertanian yang disusun dapat digolongkan baik dan membuahkan hasil seperti peningkatan ekspor pangan. "Sehingga wajar kalau di masa Pak Amran, Indonesia berhasil mengekspor beberapa komoditas pertanian," katanya, Selasa (21/5/2019).



"Berharap dengan gaya Pak Amran begini, Indonesia bisa terus ekspor, nggak perlu lagi impor," tandas Zulkifli.

Sementara itu, Mentan Amran melepas ekspor komoditas lada biji asal Belitung sebanyak 30 ton ke manca negara. Pelepasan ekspor ini langsung dilakukan di lahan lada yang berada di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Belitung, Sabtu (4/5/2019).

Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Getasan memiliki sumberdaya pertanian yang luar biasa dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani bahkan pendapatan untuk negara. Pasalnya, petani daerah ini dengan lahan seadanya mampu membudidayakan 32 jenis sayuran organik yang dipasarkan ke supermarket dan pasar ekspor seperti Singapura. "Getasan merupakan daerah sayuran dan sudah diolah menjadi sayuran organik, kelasnya supermarket dan ekspor," ujar Dirjen Hortikultura Kementan Suwandi saat meninjau usaha budidaya sayuran organik di Getasan, Semarang, Rabu (1/5/2019). Budidaya sayuran organik di Getasan ini merupakan binaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Untuk ekspor minyak kelapa sawit, Barantan mencatat adanya kenaikan selama periode Januari-April 2019. Kenaikan ini jumlahnya bahkan cukup signifikan yang bisa dilihat melalui data sistim otomasi Barantan (IQFAST).

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Ali Jamil



menjelaskan, ekspor komoditas minyak sawit beserta turunannya pada kuartal pertama cukup mencengangkan, yakni mencapai 546 juta kilogram dengan nilai transaksi sebesar Rp 5,3 triliun. "Alhamdulillah, ini berkat kerja sama semua instansi yang membuat ekspor sawit kita kembali menunjukkan tren bagus," ujarnya di sela penyerahan Surat Kesehatan Tumbuhan atau Phytosanitary Certificate (PC) kepada para pelaku usaha eksportir komoditas pertanian di Tanjungbalai Asahan, Senin (13/5/2019).

Di Mentawa, Belitung Timur, Barantan melepas ekspor 12.600 ton olahan sawit asal Belitung Timur. "Komoditas perkebunan ini menjadi andalan pemerintah dalam meraup devisa. Perlu kerja sama kolaboratif untuk mendorongnya," ujarnya saat pelepasan ekspor sekaligus menyerahkan Surat Kesehatan Tumbuhan atau Phytosanitary Certificate (PC) sebagai persyaratan ekspor negara tujuan, Kamis (2/5/2019).

Ali Jamil menyebutkan olahan sawit yang diekspor, yakni berupa minyak sawit atau palm oil sebanyak 9.000 ton senilai Rp 59,4 miliar. "Tujuan ekspornya ke Bangladesh dan bungkil sawit atau palm kernel expeller sebanyak 3.600 ton senilai Rp 6,12 miliar tujuan Vietnam," ujarnya.

Biji pinang asal Jambi sebanyak 320.260 ton dengan nilai Rp 9,1 miliar asal Jambi juga disertifikasi Barantan

sebelum diterbangkan ke Thailand dan India. "Kementan berkomitmen meningkatkan ekspor agar petani dan pelaku usaha bisa dapat nilai tambah, selain devisa bagi negara," kata Ali Jamil di Pelabuhan Talang Duku, Jambi, Sabtu (11/5/2019).

Berikutnya di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kementan kembali melepas ekspor komoditas pertanian senilai Rp 24,1 miliar. Terdapat empat komoditas pertanian yang dilepas pada Rabu (22/5), yaitu karet lempengan



INDONESIA

Jadi Negara Perekonomian

Terbesar **PADA 2030**

Lompatan PDB Pertanian Luar Biasa

PENDAPATAN Domestik Bruto (PDB) pertanian Indonesia meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. PDB pertanian Indonesia menempati posisi lima di dunia saat ini. Pembangunan pertanian terbukti telah ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) RI Amran Sulaiman menanggapi proyeksi Standard Chartered PLC baru-baru ini.

"PDB kita meningkat tajam dan nomor lima dunia. PDB Pertanian itu naik dari Rp 994 triliun menjadi Rp 1.462 triliun. Itu luar biasa, ini hampir merata di setiap sektornya," ujar Amran di kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Menurutnya, lompatan PDB Pertanian merupakan suatu capaian luar biasa serta sudah divalidasi dan ditandatangani oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga jasa keuangan tersebut juga memprediksi, PDB Indonesia akan mencapai USD 10 triliun pada 2030. Dan menempatkan bangsa ini di peringkat keempat sebagai negara dengan perekonomian terbesar dunia.

"PDB Indonesia telah menembus USD 1 triliun untuk pertama kalinya pada 2017. Dan berdasarkan proyeksi sebuah lembaga jasa keuangan internasional, pada 2030 ekonomi Indonesia berada di bawah Amerika (peringkat tiga) dan di atas Turki (peringkat lima). Tiongkok berada di puncak dengan PDB USD 64,2 triliun," pungkas Amran.

Ia menambahkan, prediksi optimistis ini tak lepas dari peran pembangunan sektor pertanian yang terus dilakukan Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo selama berkuasa empat tahun lebih terakhir ini. Hasil kerja sektor pertanian Indonesia, juga mendapat apresiasi dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO).

"FAO sendiri mengapresiasi PDB Pertanian kita," sambungnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri mengatakan, dibandingkan dengan 2017, maka PDB Sektor Pertanian pada 2018 tumbuh sebesar 3,7 persen dan mampu melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,5 persen. Dalam kurun waktu 2013 - 2018, PDB sektor pertanian secara konsisten menunjukkan tren positif. Berdasarkan harga konstan 2010 (BPS), pada 2013 PDB Sektor Pertanian sebesar Rp 847,8



triliun, dan terus meningkat masing-masing menjadi Rp 880,4 triliun pada 2014 dan Rp 906,8 triliun pada 2015. "Pada 2016 dan 2017, PDB Sektor Pertanian kembali meningkat menjadi Rp 936,4 triliun dan Rp 969,8 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada 2018, dimana PDB Sektor Pertanian meningkat menjadi Rp 1.005,4 triliun," ujarnya di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Pada awal 2019 ini (Triwulan I), Boga mengungkapkan, kinerja PDB Sektor Pertanian masih menunjukkan tren positif. Dibanding dengan Triwulan sebelumnya (Triwulan IV/2018 atau Q to Q), PDB Sektor Pertanian tumbuh Rp 40,4 triliun atau 19,67 persen (Rp 245,7 triliun vs Rp 205,3 triliun) dan bahkan tumbuh paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Demikian juga dibandingkan dengan Triwulan I/2018 (y on y), PDB Sektor Pertanian pada awal tahun ini membaik dan tumbuh 1,15 persen (Rp 245,7 triliun vs Rp 242,9 triliun).

Sebelumnya, BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-I 2019 sebesar 5,07% secara year on year (YoY). Tercatat, pertumbuhan PDB di sektor pertanian pada kuartal ini positif atau mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 1,81 persen. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2019 terhadap kuartal sebelumnya diwarnai faktor musiman. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tercatat tumbuh ekspansif sebesar 14,10 persen," ujar Kepala BPS Suharyanto di Jakarta, Senin, (6/5/2019).

Pertumbuhan kuartal-I 2019 terhadap kuartal sebelumnya sebesar 14,10 persen ini, sektor pertanian tumbuh lebih besar dari sektor kehutanan dan perikanan, yakni sektor pertanian tumbuh 19,67 persen, sektor kehutanan malah pertumbuhannya minus 10,58,

dan sektor perikanan hanya bisa tumbuh 1,85 persen.

Guru Besar Pertanian Universitas Hasanuddin Prof DR Yunus Musa mengatakan, catatan BPS itu adalah prestasi yang baik. Sektor pertanian hingga kini masih menunjukkan sebagai pendukung utama perekonomian nasional. "Tinggal terus dikembangkan angka peningkatan PDB itu. Kementan harus punya desain strategis bagaimana menambah persentasi di kuartal selanjutnya," ujarnya, Senin (6/5/2019).

Yunus mengungkapkan, kinerja ekspor komoditas pertanian dapat dijadikan pola menumbuhkan kontribusi PDB untuk ekonomi Indonesia. "Jadi harus dilihat apa saja hasil pertanian unggulan dari seluruh daerah di Indonesia yang mampu berdaya saing ekspor. Di situ pertanian dapat berkontribusi besar ke PDB," tandasnya.

Inflasi Turun

Selain itu, angka inflasi pangan Indonesia yang turun, bahkan lebih rendah dari angka inflasi umum, membuatnya semakin yakin bahwa negara ini mampu mewujudkan cita-cita menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045. Rendahnya angka inflasi pangan, menunjukkan ketersediaan yang cukup karena produksi bahan makanan hasil pertanian yang terus meningkat. "Pencapaian luar biasa empat tahun ini soal pangan negara kita, melompati 12 negara besar seperti negara Jerman, China, dan negara besar lainnya," jelas Amran.

Capaian ini bagi Amran salah satunya merupakan hasil dari sikap tegas pemerintah untuk memberantas mafia yang bermain di sektor pertanian, dan selama ini merugikan petani.

Ia menyebutkan ada 782 kasus ditangani yang sudah diproses hukum di pengadilan. "Dari data masuk ke kami yang dipenjara ada 409 orang, itu tidak mudah dan bukan pekerjaan kecil," tandasnya.

Untuk menjaga produktivitas hasil pertanian, Kementan pun telah mengantisipasi gagal panen yang disebabkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan dengan memberikan program asuransi kepada para petani seluas 1 juta hektare (ha) lahan per tahun. Petani yang sudah mengansuransikan lahan pertaniannya, jika terkena bencana alam banjir dan kekeringan bisa digantikan kerugiannya. "Sudah terserap 80-90 persen, mungkin sekarang sudah mencapai 100 persen. Kalau untuk pancaroba kita sudahantisipasi," kata Amran.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan Ketut Kariyasa menyebutkan, sejak 2015-2018 bahan makanan atau pangan menyumbang inflasi



terendah. Berbeda dengan masa sebelumnya 2013-2014, inflasi pangan masih dikategorikan tinggi kala itu. Inflasi pangan mulai mengalami penurunan pada 2015 menjadi 4,93 persen. Diketahui pada 2014, inflasi pangan masih bertengger di angka 10,57 persen. "Kemudian pada 2016 inflasi pangan, yakni 5,69 persen. Namun masih di atas inflasi umum," ujarnya, di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Kariyasa mengungkapkan, inflasi pangan makin menurun drastis pada 2017. Bahkan menjadi rekor sejarah sebab merupakan inflasi pangan terendah selama Indonesia merdeka. "Sangat membanggakan pada 2017 inflasi pangan turun sampai tingkat 1,26 persen. Merupakan inflasi pangan terendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," ucap Kariyasa. Keberhasilan Kementan menekan laju inflasi pangan terus berlanjut pada 2018 hingga awal 2019.

Apresiasi

Sejumlah pihak memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementan. DPR bahkan berkomitmen mendukung kinerja sektor pertanian yang terbukti memberikan manfaat positif untuk masyarakat dan ekonomi negara.

Salah satunya mengenai strategi kebijakan Kementan menjaga angka inflasi pangan tetap rendah dan terkendali. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Sabtu (11/5/2019).

Menurut politisi yang akrab disapa Bamsuet itu, stabilitas pangan dan produksi pertanian merupakan sektor utama pendukung kesejahteraan bangsa. "Jadi kebijakan dan regulasi pertanian kepemimpinan Mentan Amran Sulaiman harus dikawal. Seperti ingin menjaga rendahnya inflasi pangan," ujarnya.

Apresiasi yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono, Sabtu (25/5/2019) bahwa Mentan Amran merupakan salah satu sosok pejabat di era pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki sederet prestasi. Oleh sebab itu, Amran dapat dikategorikan cukup mendalam memahami pembangunan pertanian nasional sebab catatan kerjanya yang tergolong memuaskan. "Yang paling terasa itu mengenai produksi jagung. Amran mampu dongkrak produksi jagung daerah. Hasilnya kita kan mampu ekspor tahun lalu 300 ribu ton lebih," ujarnya.

Roem Kono menyebutkan, data itu membuktikan di era Amran mampu mulai membalik tradisi impor menjadi ekspor jagung. Lainnya, Amran dalam bekerja dirasakan





memiliki banyak inovasi terobosan, sehingga terasa pembangunan pertanian Indonesia saat ini berbeda dari sebelumnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto juga mengapresiasi kinerja Mentan Amran atas pemenuhan pangan Indonesia selama kurang empat tahun terakhir. Kata Agus, sosok Amran adalah sosok pekerja keras yang selalu menanamkan cita-cita swasembada. "Saya berharap Amran terus menguatkan swasembada beras yang harus menjadi andalan khusus," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Agus mengatakan, selama ini Mentan Amran juga mampu memenuhi harapan petani terkait kebutuhan bibit dan benih berkualitas yang sudah bersertifikat. Bantuan tersebut membuat banyak petani di seluruh Indonesia menyalakan kembali semangat produksi. "Terus terang, saya melihat Kementan ini posisinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kementerian lain. Artinya pak Amran sukses membantu petani melalui distribusi benih, bibit dan Alsintan (Alat Mesin Pertanian)," katanya.

Keberanian Amran memberantas mafia pangan patut diacungi jempol. Keberanian itu juga menjadikan Amran Sulaiman memiliki ciri khas. Ini disampaikan Senator DPD



RI Charles Simaremare, Sabtu (25/5/2019).

Menurut dia, capaian kinerja Amran yang akan terus diingat publik adalah tindakan tegasnya terhadap mafia pangan. "Di mana-mana Amran selalu teriak memberantas mafia pangan. Itu sebuah keberanian yang harus diapresiasi," tandasnya.

Charles berpendapat, tidak mudah menegakan sanksi hukum kepada mafia pangan. Sektor pertanian selama ini identik melekat dengan mengguritanya mafia pangan. "Tapi di tangan pak Amran, identik itu mau diubah. Mafia pangan jangan coba main-main di masa Amran. Sudah banyak juga diproses hukum," ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyebutkan, sejak awal terpilih sebagai Mentan, sosok Amran akan membawa banyak perubahan yang revolusioner. "Saya sudah prediksi Kementan pasti berubah. Saya hanya melihat beliau sebagai sosok yang memiliki tekad dan keinginan keras, serta sangat memerhatikan kepentingan petani," sebutnya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pekan Nasional Petani Nelayan XVI/2020 di Kantor Pusat Kementan, Senin (21/5/2019).

Ketahanan Pangan

Indonesia saat ini telah berada pada kondisi ketahanan dan swasembada pangan. Bahkan, dinilai mulai mengarah menuju fase kedaulatan pangan. Wujud ketahanan pangan tersebut tampak pada upaya pemerintah selama ini menjamin ketersediaan pangan dan pasokannya meskipun harus diakui areal

persawahan banyak menyusut. "Ya kalau ketahanan pangan, Indonesia sudah cukup bagus. Sekarang rasanya mau mengarah menciptakan kedaulatan pangan ya," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bambang Budi Waluyo, Kamis (24/5/2019).

Bambang menjelaskan, selama ini seluruh masyarakat Indonesia tidak pernah mengalami kehilangan kebutuhan barang pangan di pasaran. Selain itu, mengenai harga pangan meskipun sesekali mengalami lonjakan namun secara rata-rata setiap tahun masih terkendali.

Dalam kesempatan ke Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (28/5/2019), Mentan Amran meminta warga Muna untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. "Kabupaten Muna harus menjadi wilayah yang mandiri pangan. Mimpi saya, di sini jangan ada masyarakat yang beli sayur di pasar. Harus dibangun sistem bagaimana protein dan karbohidrat tanam sendiri. Tanam lah sayur. Pelihara lah ayam. Gizi generasi ini harus lebih baik," tandasnya.

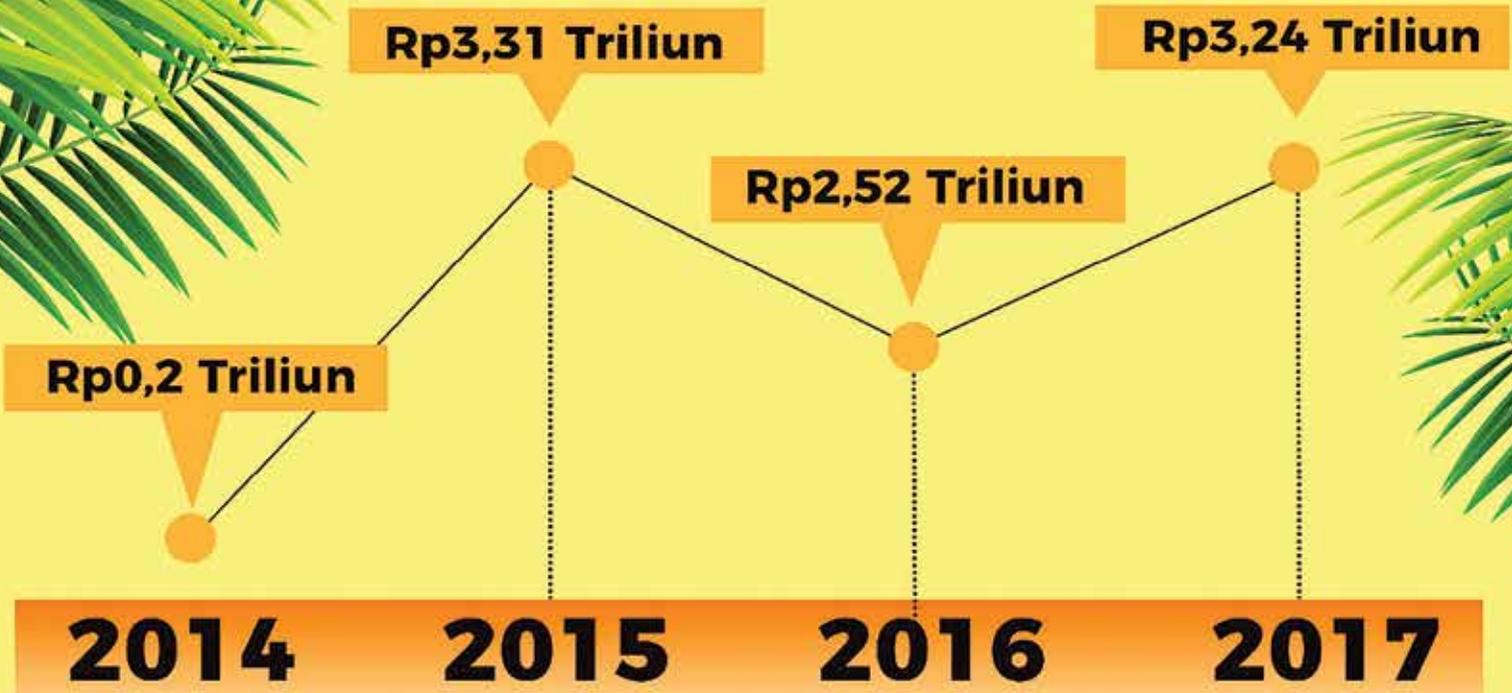
Kementan, lanjut Amran, sudah menyiapkan bantuan benih untuk pengembangan jagung seluas 10.000 hektare (ha). Kementan juga akan memfasilitasi pengembangan ayam KUB dan kambing integrasi. Amran mengharapkan pemerintah dan warga Muna dapat mengelola bantuan tersebut secara maksimal. "Penuhi kebutuhan pangan, jangan sampai ada sejenkal tanah yang tidak dimanfaatkan. Jangan sampai ada air mengalir di bumi ini yang tidak dimanfaatkan untuk pertanian," seru Amran. **(tim humas)**





NILAI EKSPOR NANAS

TAHUN 2014 - 2018



Periode 2014-2017 nilai ekspor naik: 1.520%

Total nilai ekspor Rp 9,09 Triliun

Sumber: BPS

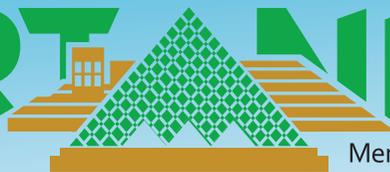


KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KELUARGA BESAR MAJALAH

Warta

PERTANIAN



Menuju Kedaulatan Pangan

Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA

idulfitri

1 SYAWAL 1440H



minjal aidiq wal faiziq

MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN